



Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara

LAPORAN KINERJA TAHUN 2018

NOMOR : LKJ-14/PW20/6/2019
TANGGAL : 9 JANUARI 2019

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Gambar	iv
Daftar Tabel	v
Daftar Lampiran	vi
Ringkasan Eksekutif	vii
Bab I Pendahuluan	1
A. Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Organisasi	1
B. Aspek Strategis Organisasi	4
C. Kegiatan dan Produk Organisasi	5
D. Struktur Organisasi	6
E. Sistematika Penyajian	7
Bab II Perencanaan Kinerja	9
A. Rencana Strategis 2015-2019	9
1. Visi	9
2. Misi	9
3. Tujuan dan Sasaran	9
4. Indikator Kinerja Utama.....	9
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2018	11
Bab III Akuntabilitas Kinerja	14
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	14
1. Analisis Capaian Kinerja Program	16
Sasaran Program Pengawasan 1	16
Sasaran Program Pengawasan 2	20
Sasaran Program Pengawasan 3	24
Sasaran Program Pengawasan 4	25
Sasaran Program Pengawasan 5	26
Sasaran Program Pengawasan 6	28
Sasaran Program Pengawasan 7	33
Sasaran Program Dukungan Pengawasan	40
2. Analisis Capaian Kinerja Kegiatan	43
Sasaran Kegiatan 1.....	45

	Halaman
Sasaran Kegiatan 2.....	45
Sasaran Kegiatan 3.....	47
Sasaran Kegiatan 4.....	49
Sasaran Kegiatan 5.....	50
Sasaran Kegiatan 6.....	51
Sasaran Kegiatan 7.1.....	52
Sasaran Kegiatan 7.2.....	53
B. Akuntabilitas Kinerja Lainnya	54
1. Kinerja Lain	54
2. Penghargaan	54
C. Akuntabilitas Keuangan.....	55
Bab IV Penutup	56
A. Simpulan Capaian Kinerja	56
B. Kendala Pencapaian dan Rencana Tindak Perbaikan	56

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Struktur Organisasi.....	6
Gambar 3.1 Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan.....	18
Gambar 3.2 Capaian Level Kapabilitas APIP Inspektorat Provinsi, Kabupaten, dan Kota se-Sulawesi Tenggara.....	35
Gambar 3.3 Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas Level 3.....	39
Gambar 3.4 Capaian Kinerja IKU Kepuasan atas Pelayanan Sekretariat Utama Tahun 2018.....	41
Gambar 3.5 Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Kepuasan atas Pelayanan Sekretariat Utama dengan Target 8 Skala 1-10.....	43
Gambar 3.6 Anggaran dan Realisasi Keuangan per Jenis Belanja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018.....	55
Gambar 3.7 Anggaran dan Realisasi per Program Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018.....	55

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1	Komposisi SDM Tahun 2018..... 7
Tabel 1.2	Komposisi Pejabat Fungsional Auditor Tahun 2018..... 7
Tabel 2.1	Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Tahun 2018..... 10
Tabel 2.2	Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2018..... 11
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018..... 11
Tabel 2.4	Rincian Anggaran Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018..... 13
Tabel 3.1	Capaian IKU Sasaran Program Tahun 2018..... 14
Tabel 3.2	Ringkasan Target, Realisasi dan Capaian IKU Sasaran Program Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara/Korporasi..... 16
Tabel 3.3	Permasalahan Kinerja PDAM..... 19
Tabel 3.4	Daftar Predikat Kinerja BLUD..... 19
Tabel 3.5	Permasalahan Kinerja BLUD..... 20
Tabel 3.6	Ringkasan Target, Realisasi dan Capaian IKU Sasaran Program Pengawasan 2..... 21
Tabel 3.7	Ringkasan Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP Pemda..... 29
Tabel 3.8	Tingkat maturitas SPIP Pemda Tahun 2015 s.d. 2018..... 29
Tabel 3.9	Ringkasan Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program Meningkatnya Kapabilitas APIP se-Provinsi Sulawesi Tenggara..... 34
Tabel 3.10	Tingkat Kapabilitas APIP Pemda tahun 2015 s.d. 2018..... 36
Tabel 3.11	Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Kegiatan Tahun 2018..... 43
Tabel 3.12	Implementasi Siskeudes Tahun 2015 s.d. 2018..... 46
Tabel 3.13	Pemda yang Melakukan Implementasi SIMDA Perencanaan Tahun 2017 dan 2018..... 46
Tabel 3.14	Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018..... 52
Tabel 3.15	Target, Realisasi Dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Dukungan 2..... 53

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I Kinerja Sasaran Program dan Penggunaan Dana/SDM (OH) Tahun 2018 Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara
- Lampiran II Perbandingan Realisasi dan Capaian *Outcome* Tahun 2018 Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara
- Lampiran III Capaian Kinerja Kegiatan dan Efisiensi Penggunaan Dana/OH Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018
- Lampiran IV Perbandingan Realisasi dan Capaian Kegiatan Tahun 2018 Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara
- Lampiran V Maturitas SPIP Pemda Tahun 2018 Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara
- Lampiran VI Kapabilitas APIP Pemda Tahun 2018 Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara
- Lampiran VII Tingkat Kesehatan BUMD Tahun 2018 Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara
- Lampiran VIII Jumlah Desa Implementasi Siskeudes Tahun 2015 s.d. 2018 Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara
- Lampiran IX Realisasi Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2018 Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara
- Lampiran X Daftar Penghargaan yang Diterima Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2015 s.d. 2018

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pertanggungjawaban suatu instansi pemerintah kepada pemberi amanah, pada prinsipnya merupakan kewajiban instansi pemerintah untuk menjelaskan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan. Pertanggungjawaban tersebut mencakup keberhasilan maupun kegagalan organisasi dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Sesuai tugas dan fungsinya, BPKP telah menyusun rencana strategis, yang berorientasi pada hasil, yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun sebagaimana dituangkan dalam Renstra BPKP tahun 2015-2019. Visi yang ingin diwujudkan BPKP adalah menjadi **“Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional”**.

Seiring dengan perubahan visi tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara, telah melakukan perubahan terhadap misi yang ada menjadi tiga misi, sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional guna Mendukung Tata Kelola Pemerintahan dan Korporasi yang Bersih dan Efektif.
2. Membina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang Efektif.
3. Mengembangkan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten.

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi di atas, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara telah menyusun dokumen Perjanjian Kinerja (Perkin) Tahun 2018. Perkin tersebut memuat sasaran program dengan indikator kinerja program (*outcome*) dan indikator kinerja kegiatan (*output*) serta anggaran dana yang dibutuhkan dalam pencapaian sasaran program.

Laporan Kinerja (LKj) ini merupakan salah satu media yang menunjukkan kesiapan BPKP dalam menjawab pertanyaan atas pencapaian kinerja tahun 2018. LKj ini juga sebagai alat kendali dan alat pengukuran kinerja menuju terwujudnya akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas.

Hasil penilaian pelaksanaan kinerja tahun 2018 menunjukkan bahwa sebagian besar sasaran program dan kegiatan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara telah tercapai. Pencapaian/pemenuhan sasaran program dan kegiatan pada masing-masing indikator program dan kegiatan dapat dilihat pada Tabel Target dan Capaian Kinerja Tahun 2018 sebagai berikut:

Tabel Target dan Capaian Kinerja Tahun 2018

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Sasaran Program 1 : Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara/Korporasi					
1.1	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan	%	60,00	62,60	104,33
1.2	Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dievaluasi	%	9,00	9,09	101,01
1.3	Persentase BLUD yang tata kelolanya minimal cukup baik dari BLUD yang dievaluasi	%	50,00	50,00	100
Sasaran Program 2 : Meningkatnya Efektivitas Hasil Pengawasan Keinvestigasian					
2.1	Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di persidangan	%	50,00	58,18	116,36
2.2	Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH	%	72,00	100	138,89
2.3	Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K	%	65,00	100	153,85
2.4	Persentase hasil audit penyesuaian harga yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K	%	75,00	0,00	0,00
Sasaran Program 3: Meningkatnya Penyelesaian Hambatan Pelaksanaan Pembangunan Nasional					
3.1	Persentase penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan	%	75,00	100	133,33
Sasaran Program 4: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah Dan Korporasi Dalam Pencegahan Korupsi					
4.1	Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP (termasuk FRA)	%	52,00	83,33	160,25
Sasaran Program 5: Meningkatnya Kepedulian K/L/P/K Dan Masyarakat Terhadap Korupsi					
5.1	Persentase K/L/P/K Anggota Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) yang mengimplementasikan Sistem Pengaduan Masyarakat	%	65,00	0,00	0,00

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Sasaran Program 6: Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP Pemda					
6.1	Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP Level 3	%	100	100	100
6.2	Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas Level 3	%	59,00	59,00	100
6.3	Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas Level 2	%	41,00	5,88	14,35
Sasaran Program 7: Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda					
7.1	Persentase APIP Pemerintah Provinsi dengan Kapabilitas Level 3	%	100	0,00	0,00
7.2	Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas Level 3	%	35,00	0,00	0,00
7.3	Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas Level 2	%	65,00	118,18	100
Sasaran Program Dukungan Pengawasan : Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan atas Pelayanan Sekretariat Utama					
8.1	Kepuasan atas Pelayanan Sekretariat Utama (skala <i>likert</i> 1-10)	Skala	8	7,2	90

Pencapaian kinerja selama tahun 2018 direalisasikan dengan penyerapan anggaran sebesar Rp20.407.319.985,00 atau 96,17% dari total anggaran sebesar Rp21.219.470.000,00. Dengan penyerapan anggaran sebesar 96,17% menunjukkan bahwa pada tahun 2018, realisasi capaian kinerja keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara sangat baik.

Kendala yang dihadapi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara dalam mencapai target kinerja 2018 adalah sebagai berikut:

1. Hasil audit penyesuaian harga yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K tidak tercapai karena tidak ada pelaksanaan kontrak pada K/L/P/K yang mengajukan permintaan penyesuaian harga.
2. Kurangnya komitmen anggota Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KomPAK) untuk mengembangkan sistem pengaduan masyarakat (*Internal Whistle Blowing System*) di lingkungan unit kerjanya.
3. Peningkatan capaian maturitas SPIP pada Pemerintah Kabupaten/Kota yaitu:
 - a. Pemda belum menetapkan target maturitas SPIP dalam RPJMD sehingga penerapan SPIP masih belum menjadi prioritas pemda.
 - b. Kurangnya komitmen pemda dalam penerapan SPIP.

- c. Kurangnya pemahaman SDM SKPD dan APIP dalam penyelenggaraan SPIP dan penyiapan dokumen peningkatan maturitas SPIP.
4. Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota Level 3 belum dapat dicapai antara lain disebabkan oleh:
 - a. Pemda belum menetapkan target Kapabilitas APIP dalam RPJMD sehingga penerapan Kapabilitas APIP masih belum menjadi prioritas pemda.
 - b. Kurangnya komitmen pemda dalam Peningkatan Kapabilitas APIP.
 - c. Kurangnya pemahaman SDM APIP dalam penyelenggaraan Peningkatan Kapabilitas APIP dan penyiapan dokumen peningkatan Kapabilitas APIP.
 - d. Beberapa indikator capaian Kapabilitas APIP level 3 tidak hanya dapat dicapai melalui pemenuhan Infrastruktur Kapabilitas APIP saja, tetapi perlu penerapan dari seluruh Infrastruktur yang telah dibuat dalam kegiatan organisasi.
 - e. Keterbatasan SDM APIP menyebabkan satuan tugas peningkatan kapabilitas APIP yang dibentuk tidak bisa bertugas secara optimal, sehingga penyiapan infrastruktur peningkatan kapabilitas APIP menjadi terhambat.
 5. Dukungan Teknis Kepuasan atas Pelayanan Sekretariat Utama Perwakilan BPKP belum dapat dicapai antara lain disebabkan oleh:
 - a. Pengelolaan layanan kearsipan melalui penggunaan aplikasi DMS belum optimal.
 - b. Distribusi dalam persuratan belum tepat waktu.
 - c. Kebutuhan belanja modal belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pegawai.
 - d. Penyelesaian pertanggungjawaban keuangan serta penyediaan media informasi terkait keuangan belum tepat waktu.
 - e. Belum melakukan pemutakhiran data kepegawaian secara *real time* melalui aplikasi SISPEDAP.

Langkah yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara dalam rangka meningkatkan kinerja di masa mendatang adalah:

1. Memberikan atensi kepada Kepala Daerah untuk meningkatkan tata kelola keuangan daerah, antara lain dalam penggunaan alokasi dana desa (APBD), dana desa (APBN), bansos, hibah, dan pengadaan barang/jasa. Selain itu,

mengingatnkan pentingnya peran inspektorat sebagai APIP dalam mengawal akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (*Three Line of Defense*).

2. Lebih aktif menjalin komunikasi *stakeholder* khususnya aparat penegak hukum di wilayah Sulawesi Tenggara, serta dengan kedeputian investigasi di BPKP Pusat.
3. Melaksanakan kegiatan pengembangan Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KomPAK) dan lebih aktif mendorong anggota Komunitas Pembelajar Anti Korupsi untuk dapat mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat di unit kerjanya.
4. Komunikasi yang lebih efektif dan proaktif dengan Kepala Daerah dan satgas SPIP Pemerintah Daerah se-wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara guna memonitor pemenuhan sub unsur yang diperlukan.
5. Melakukan bimtek/asistensi terhadap pemenuhan dokumen seluruh sub unsur SPIP.
6. Terus meningkatkan kompetensi pegawai secara berkelanjutan terutama dalam rangka mengisi peran BPKP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008, antara lain dengan mengikutsertakan pegawai dalam diklat teknis substansi, meningkatkan kuantitas dan kualitas PPM, menyelenggarakan atau mengikuti forum-forum diskusi, seminar, *workshop*, dan berbagai metode peningkatan kompetensi lainnya.
7. Memperbaiki komposisi pegawai dengan penambahan tenaga Auditor Muda untuk memenuhi kebutuhan tenaga Ketua Tim serta Fungsional Umum untuk memperkuat kegiatan dukungan manajemen di Bidang Ketatausahaan.
8. Meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas, antara lain dengan menyempurnakan secara terus-menerus berbagai pedoman dan SOP yang dibutuhkan, meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas satgas yang telah ada, meningkatkan kualitas pemanfaatan formulir-formulir kendali mutu, mengefektifkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, meningkatkan kualitas kertas kerja dan hasil pengawasan, serta melakukan pembenahan administrasi.
9. Meningkatkan komitmen seluruh jajaran Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara untuk bekerja secara profesional, berintegritas dan berdedikasi tinggi, mematuhi aturan perilaku dan etika profesi, serta meningkatkan kualitas budaya

kerja dalam rangka mewujudkan visi dan misi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara.

10. Meningkatkan pelaksanaan fungsi kehumasan serta menjalin dan menjaga kerja sama yang baik dengan *stakeholders* secara profesional.
11. Mengoptimalkan aplikasi DMS dalam pengelolaan layanan kearsipan.
12. Menyusun SOP Distribusi Persuratan.
13. Menyusun Rencana Kebutuhan Barang (RKB).
14. Percepatan waktu penyelesaian pertanggungjawaban keuangan serta penyediaan media informasi terkait keuangan.
15. Pemutakhiran data kepegawaian secara *real time* melalui aplikasi SISPEDAP.

BAB I PENDAHULUAN

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merupakan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) dengan tugas utama membantu Presiden mengawasi pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara dan pembangunan. Tugas dan fungsi BPKP di seluruh Indonesia dilaksanakan oleh 34 kantor Perwakilan. Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara berkedudukan di Kendari dan dibentuk sejak tahun 1988, dengan wilayah pengawasan sebanyak 18 (delapan belas) Pemerintah Daerah yang terdiri dari 1 (satu) Pemerintah Provinsi, 2 (dua) Pemerintah Kota, dan 15 (lima belas) Pemerintah Kabupaten.

A. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi

Tugas, fungsi, dan wewenang BPKP, aspek strategis organisasi, kegiatan dan layanan produk organisasi, struktur organisasi, komposisi pegawai, serta sistematika penyajian Laporan Kinerja Tahun 2018 lebih lanjut diuraikan sebagai berikut:

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan sesuai Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-06.00.00-286/K/2001 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPKP, Perwakilan BPKP bertugas:

1. Melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan/atau daerah atas kegiatan yang bersifat lintas sektoral;
2. Melaksanakan kegiatan pengawasan kebendaharaan umum negara;
3. Melaksanakan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden dan/atau permintaan Kepala Daerah;
4. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada wilayah kerjanya; dan
5. Menyelenggarakan penyelenggaraan dan pelaksanaan fungsi lain di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan rencana dan program;
2. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan SPIP;
3. Pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan pengurusan barang milik/kekayaan pemerintah daerah atas permintaan daerah;
4. Pengawasan atas penyelenggaraan tugas pemerintahan yang bersifat strategis dan/atau lintas kementerian/lembaga/wilayah;
5. Pengawasan terhadap kegiatan kebendaharaan umum negara di wilayah kerjanya;
6. Pemberian asistensi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
7. Pemberian asistensi penyusunan laporan keuangan daerah;
8. Pemberian asistensi terhadap pengelolaan keuangan negara/daerah, BUMN/BUMD, dan kinerja instansi Pemerintah Pusat/Daerah/BUMN/BUMD;
9. Pengawasan terhadap badan usaha milik negara/daerah, badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah dan badan usaha milik daerah atas permintaan pemangku kepentingan, kontrak bagi hasil dan kontrak kerja sama, dan pinjaman/bantuan luar negeri yang diterima pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Evaluasi terhadap pelaksanaan *good corporate governance* dan laporan akuntabilitas kinerja pada badan usaha milik negara, badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah dan badan usaha milik daerah atas permintaan pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Audit investigasi terhadap indikasi penyimpangan yang merugikan keuangan negara, badan usaha milik negara, dan badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, pengawasan terhadap hambatan kelancaran pembangunan, dan pemberian bantuan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara serta pemberian keterangan ahli kepada instansi penyidik dan instansi pemerintah lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

12. Pelaksanaan analisis dan penyusunan laporan hasil pengawasan serta pengendalian mutu pengawasan; dan
13. Pelaksanaan administrasi Perwakilan BPKP.

Wewenang dari Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara mengacu pada wewenang yang dimiliki BPKP secara keseluruhan, yaitu:

1. Penyusunan rencana nasional secara makro di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan;
2. Perumusan kebijakan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan untuk mendukung pembangunan secara makro;
3. Penetapan sistem informasi di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan;
4. Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan;
5. Penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga profesional/ahli serta persyaratan jabatan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan; dan
6. Kewenangan lain yang melekat dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:
 - a. Memasuki semua kantor, bengkel, gudang, bangunan, tempat-tempat penimbunan dan sebagainya;
 - b. Meneliti semua catatan, data elektronik, dokumen, buku penghitungan, surat-surat bukti, notulen rapat direksi/komisaris/panitia dan sejenisnya, hasil survei laporan pengelolaan, dan surat-surat lainnya yang diperlukan dalam pengawasan;
 - c. Melakukan pengawasan kas, surat-surat berharga, gudang persediaan, dan lainnya;
 - d. Meminta keterangan tentang tindak lanjut hasil pengawasan baik hasil pengawasan BPKP sendiri, maupun hasil pengawasan lembaga pengawasan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Aspek Strategis Organisasi

BPKP sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah Presiden, pertama kali didirikan pada tanggal 30 Mei 1983 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983. Dalam perkembangannya, BPKP memandang beberapa aspek strategis yang secara dinamis mempengaruhi kiprah organisasi sampai dengan saat ini, sekarang, dan masa yang akan datang, meliputi:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Pasal 2 dan 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), menyatakan bahwa BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPKP menyelenggarakan dua fungsi utama yaitu fungsi pengarahan dan pengoordinasian pengawasan intern, fungsi pengawasan intern.
2. Dalam melaksanakan fungsi pengarahan dan pengoordinasian pengawasan intern, BPKP merumuskan kebijakan nasional pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional serta sinergi penyelenggaraan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional bersama-sama dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) lainnya.
3. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan intern, BPKP melakukan (a) pengawasan intern atas akuntabilitas keuangan negara dalam kegiatan yang bersifat lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dan kegiatan berdasarkan penugasan oleh presiden, serta (b) pembinaan penyelenggaraan SPIP.
4. Pembangunan pengawasan yang dilakukan oleh BPKP, merupakan bagian dari pembangunan bidang aparatur dan hukum sebagaimana disebutkan dalam agenda prioritas kedua RPJMN 2015 – 2019, yaitu membuat pemerintah selalu hadir dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, serta agenda prioritas keempat RPJMN 2015 – 2019, yaitu memperkuat kehadiran negara dalam reformasi dan penegakan hukum.

5. Sebagai auditor internal pemerintah dan aparat Presiden, BPKP mengarahkan kebijakan dan strategi pengawasan nasional untuk mendukung terwujudnya pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Untuk mewujudkannya maka seluruh kapasitas dan kapabilitas BPKP difokuskan untuk melakukan pengawasan terhadap aspek keuangan dan pembangunan nasional melalui pengawalan akuntabilitas pembangunan nasional, peningkatan kontribusi ruang fiskal, pengamanan aset negara/daerah, dan peningkatan *governance system*.

C. Kegiatan dan Produk Organisasi

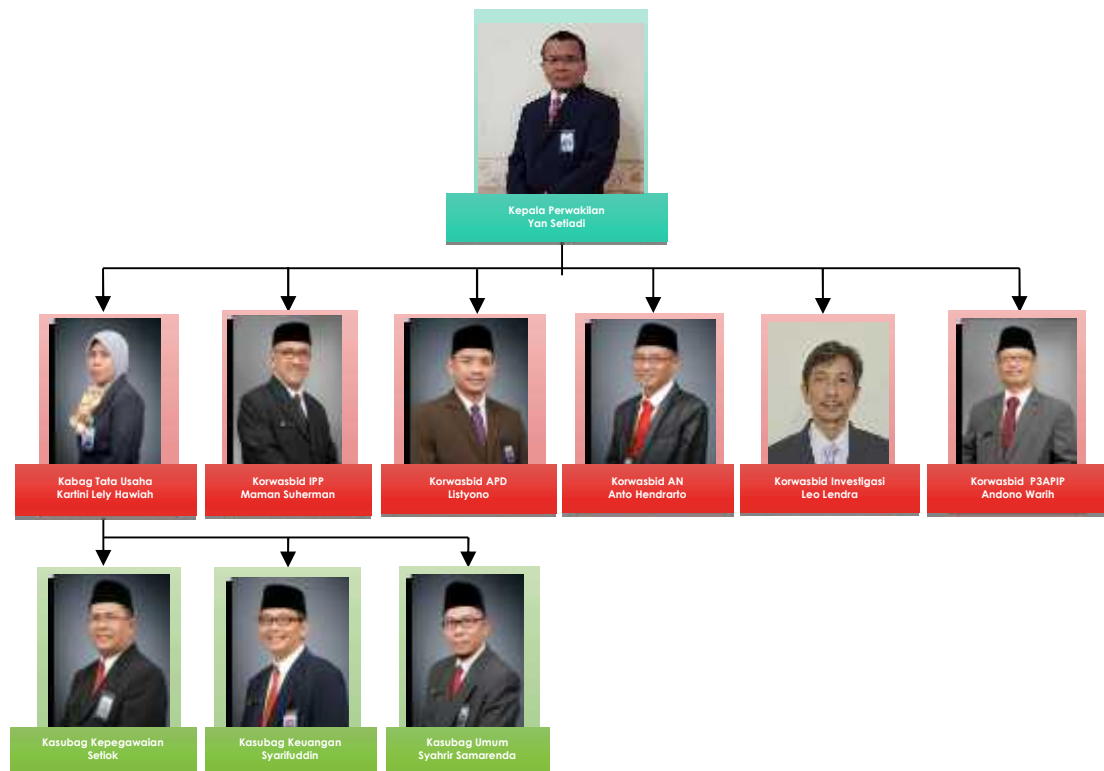
Dalam menjalankan tugasnya, BPKP melakukan kegiatan perumusan kebijakan nasional pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional meliputi kegiatan yang bersifat lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, dan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden. Adapun kegiatan dan layanan pengawasan intern BPKP meliputi: (i) pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan negara/daerah dan akuntabilitas pengeluaran keuangan negara/daerah serta pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara/daerah dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah, serta akuntabilitas pembiayaan keuangan negara/daerah; (ii) pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan aset negara/daerah; (iii) pemberian konsultasi terkait dengan manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola terhadap instansi/badan usaha/badan lainnya dan program/kebijakan pemerintah yang strategis; (iv) pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit perhitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli dan upaya pencegahan korupsi; (v) pelaksanaan reviu atas laporan keuangan dan laporan kinerja pemerintah pusat; dan (vi) pelaksanaan sosialisasi,

pembimbingan, dan konsultasi penyelenggaraan sistem pengendalian intern kepada instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan lainnya.

Secara umum, kegiatan pengawasan BPKP dikelompokkan ke dalam kegiatan asuran (*Assurance*), konsultasi (*Conculting/Advisory*), dan pengawasan lainnya. Contoh asuran misalnya audit, evaluasi, reviu, dan monitoring, sedangkan konsultasi meliputi asistensi serta pembimbingan dan konsultasi. Contoh pengawasan lainnya meliputi penyusunan pedoman, sosialisasi, penyelenggaraan diklat, dan peningkatan kapabilitas APIP.

D. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor 14 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Sulawesi Tenggara, Struktur Organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai berikut:



Gambar 1.1. Struktur Organisasi

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara dipimpin oleh Kepala Perwakilan yang dibantu oleh 5 orang Koordinator Pengawasan dan 4 orang Pejabat Struktural, yaitu Kepala Bagian Tata Usaha, Kasubbag Umum, Kasubbag Kepegawaian, dan Kasubbag Keuangan.

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara didukung oleh SDM sebanyak 96 orang per 31 Desember 2018, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1
Komposisi SDM Tahun 2018

Jabatan	Jumlah (Orang)	Persentase
Pejabat Struktural	10	10,42
Pejabat Fungsional Auditor	69	71,88
Pejabat Fungsional Arsiparis	2	2,08
Analisis Kepegawaian	3	3,13
Pranata Komputer	1	1,04
Fungsional Umum	11	11,45
Jumlah	96	100

Tabel 1.2
Komposisi Pejabat Fungsional Auditor Tahun 2018

Jabatan	Jumlah (Orang)	Persentase
Auditor Madya	4	5,79
Auditor Muda	6	8,70
Auditor Pertama	47	68,11
Auditor Penyelia	6	8,70
Auditor Pelaksana Lanjutan	4	5,80
Auditor Pelaksana	2	2,90
Jumlah	69	100

E. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dengan sistematika penyajian sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas tugas, fungsi, dan wewenang organisasi BPKP, aspek strategis organisasi, kegiatan dan produk organisasi, struktur organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara serta sistematika penyajian laporan.

Bab II: Perencanaan Kinerja, menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan

anggaran Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 meliputi Rencana Strategis Tahun 2015-2019, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2018.

Bab III: Akuntabilitas Kinerja Tahun 2018, menjelaskan capaian kinerja dan realisasi akuntabilitas keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 sebagai hasil implementasi keseluruhan program dan kegiatan dalam periode tersebut.

Bab IV: Penutup, menjelaskan simpulan umum dari Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 dan uraian rencana tindak dan langkah-langkah yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Tahun 2015-2019

1. Pernyataan Visi

Mengacu pada visi BPKP Pusat, visi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara adalah menjadi “***Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional***”.

2. Pernyataan Misi

Dalam rangka mencapai visi tersebut, misi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara adalah:

- a. Menyelenggarakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional guna Mendukung Tata Kelola Pemerintahan dan Korporasi yang Bersih dan Efektif.
- b. Membina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang Efektif.
- c. Mengembangkan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten.

3. Tujuan dan Sasaran

Untuk menjalankan misi tersebut, tujuan strategis yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional yang Bersih dan Efektif;
- b. Meningkatnya Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
- c. Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten.

4. Indikator Kinerja Utama

a. Sasaran Program

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki 7 (tujuh) sasaran program pengawasan dengan 16 (enam belas) indikator kinerja program dan 1 (satu) sasaran program dukungan manajemen dan pelaksanaan

tugas teknis lainnya dengan satu indikator kinerja program sebagai alat ukur pencapaian sasaran program.

Uraian indikator kinerja program (IKP) untuk masing-masing sasaran program terlihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Tahun 2018

No	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)
A. Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional serta Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	
Sasaran Program Pengawasan 1 Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional Dan Pengelolaan Keuangan Negara/Korporasi	
1	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
2	Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dievaluasi
3	Persentase BLUD yang tata kelolanya minimal cukup baik dari BLUD yang dievaluasi
Sasaran Program Pengawasan 2 Meningkatnya Efektivitas Hasil Pengawasan Keinvestigasian	
1	Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di persidangan
2	Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH
3	Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K
4	Persentase hasil audit penyesuaian harga yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K
Sasaran Program Pengawasan 3 Meningkatnya Penyelesaian Hambatan Pelaksanaan Pembangunan Nasional	
1	Persentase penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan
Sasaran Program Pengawasan 4 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah dan Korporasi Dalam Pencegahan Korupsi	
1	Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP (termasuk FRA)
Sasaran Program Pengawasan 5 Meningkatnya Kepedulian K/L/P/K dan Masyarakat Terhadap Korupsi	
1	Persentase K/L/P/K anggota Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) yang mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat
Sasaran Program Pengawasan 6 Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP Pemda/Korporasi	
1	Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP Level 3
2	Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 3
3	Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 2
Sasaran Program Pengawasan 7 Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda	
1	Persentase Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3)
2	Persentase Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3)
3	Persentase Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 2)
B. Program Dukungan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	
Sasaran Program Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan atas Pelayanan Sekretariat	
1	Kepuasan atas Pelayanan Sekretariat Utama (Skala Likert 1-10)

b. Sasaran Kegiatan

Unit Kerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki 6 (enam) sasaran kegiatan pengawasan dengan 6 (enam) indikator kinerja kegiatan dan 2 (dua) sasaran kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dengan 3 (tiga) indikator kinerja kegiatan sebagai alat ukur pencapaian sasaran kegiatan. Uraian indikator kinerja kegiatan (IKK) untuk masing-masing sasaran kegiatan dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2018

No	Indikator Kinerja Kegiatan (<i>Output</i>)
A. Sasaran Kegiatan Pengawasan	
Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan 260 PSN di Perwakilan	
1	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan PSN BPKP Perwakilan
Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan Siskeudes di Perwakilan	
1	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Siskeudes BPKP Perwakilan
Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan Penerapan SIMDA di Seluruh Perwakilan	
1	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan SIMDA BPKP Perwakilan
Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan 10 Prioritas Nasional	
1	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan BPKP Perwakilan
Tersedianya Informasi Hasil Pembinaan SPIP Perwakilan	
1	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP BPKP Perwakilan
Tersedianya Informasi Hasil Pembinaan Kapabilitas APIP Perwakilan	
1	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Perwakilan
B. Sasaran Kegiatan Dukungan Manajemen	
Tersedianya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dalam Mencapai Kepuasan Layanannya	
1	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP
Termanfaatkannya Aset secara Optimal	
1	Tersedianya Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi BPKP
2	Tersedianya Peralatan Fasilitas Perkantoran BPKP

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Perjanjian Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3.
Perjanjian Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara
Tahun 2018

No	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)	Satuan	Target
A. Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional serta Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah			
Sasaran Program Pengawasan 1			
Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara/ Korporasi			

No	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)	Satuan	Target
1	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	%	60
2	Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dievaluasi	%	9
3	Persentase BLUD yang tata kelolanya minimal cukup baik dari BLUD yang dievaluasi	%	50
Sasaran Program Pengawasan 2			
Meningkatnya Efektivitas Hasil Pengawasan Keinvestigasian			
1	Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di persidangan	%	50
2	Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH	%	72
3	Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K	%	65
4	Persentase hasil audit penyesuaian harga yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K	%	75
Sasaran Program Pengawasan 3			
Meningkatnya Penyelesaian Hambatan Pelaksanaan Pembangunan Nasional			
1	Persentase penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan	%	75
Sasaran Program Pengawasan 4			
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah Dan Korporasi Dalam Pencegahan Korupsi			
1	Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP (termasuk FRA)	%	52
Sasaran Program Pengawasan 5			
Meningkatnya Kepedulian K/L/P/K dan Masyarakat Terhadap Korupsi			
1	Persentase K/L/P/K anggota Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) yang mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat	%	65
Sasaran Program Pengawasan 6			
Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP Pemda/korporasi			
1	Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP Level 3	%	100
2	Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 3	%	59
3	Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 2	%	41
Sasaran Program Pengawasan 7			
Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda			
1	Persentase Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3)	%	100
2	Persentase Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3)	%	35
3	Persentase Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 2)	%	65
B. Program Dukungan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya			
Sasaran Program Dukungan Pengawasan			
Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan atas Pelayanan Sekretariat			
1	Persepsi Kepuasan Layanan Kesesuaian	Skala	8
No	Indikator Kinerja Kegiatan (<i>Output</i>)	Satuan	Target
A. Sasaran Kegiatan Pengawasan			
Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan 260 PSN di Perwakilan			
1	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan PSN BPKP Perwakilan	Laporan	59
Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan Siskeudes di Perwakilan			
1	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Siskeudes BPKP Perwakilan	Laporan	15

No	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)	Satuan	Target
Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan Penerapan SIMDA di Seluruh Perwakilan			
1	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan SIMDA BPKP Perwakilan	Laporan	3
Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan 10 Prioritas Nasional			
1	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan BPKP Perwakilan	Laporan	79
Tersedianya Informasi Hasil Pembinaan SPIP Perwakilan			
1	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP BPKP Perwakilan	Laporan	25
Tersedianya Informasi Hasil Pembinaan Kapabilitas APIP Perwakilan			
1	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Perwakilan	Laporan	38
B. Sasaran Kegiatan Dukungan Pengawasan			
Tersedianya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dalam Mencapai Kepuasan Layanan			
1	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP	Laporan	12
Termanfaatkannya Aset secara Optimal			
1	Tersedianya Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi BPKP	Unit	23
2	Tersedianya Peralatan Fasilitas Perkantoran BPKP	Unit	15

Total anggaran yang tersedia untuk mencapai target kinerja tahun 2018 semula adalah sebesar Rp20.092.541.000,00. Selama tahun berjalan, terdapat revisi anggaran menjadi Rp21.219.470.000. Rincian anggaran untuk masing-masing program dan kegiatan terdapat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4
Rincian Anggaran Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara
Tahun 2018

Kegiatan	Anggaran (Rp)	Revisi Anggaran (Rp)
Program 06		
Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional serta Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah		
3701.420 – Pengawasan PSN	2.032.466.000	1.521.466.000
3701.520 – Pengawasan Siskeudes	325.209.000	336.209.000
3701.620 – Pengawasan SIMDA	102.726.000	122.726.000
3701.230 – Pengawasan BPKP	749.720.000	1.229.720.000
3701.263 – Pembinaan SPIP	563.400.000	563.400.000
3701.296 – PK APIP	776.644.000	776.644.000
Total (06)	4.450.165.000	4.550.165.000
Program 01		
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya		
3670 – Dukungan Manajemen	14.453.851.000	15.633.873.000
3676 – Fasilitas Dukungan	844.710.000	791.617.000
3678 – Sarpras	243.815.000	243.815.000
Total (01)	15.542.376.000	16.669.305.000
Total (06+01)	20.092.541.000	21.219.470.000

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja tahun 2018 merupakan bagian dari penyelenggaraan akuntabilitas kinerja tahunan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara. Pengukuran capaian kinerja dilakukan sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018. Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target indikator kinerja terdiri dari dua jenis, yaitu:

) **Semakin tinggi realisasi, capaian kerjanya semakin baik**

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

) **Semakin tinggi realisasi, capaian kerjanya semakin buruk**

$$\text{Capaian} = \frac{2 \times \text{Target} - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi capaian setiap indikator kinerja untuk mengidentifikasi faktor yang mendukung keberhasilan dan kendala yang menghambat pencapaian target kinerja dicermati dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.

Capaian atas indikator kinerja utama (IKU) yang menunjukkan capaian tujuan dan sasaran program secara ringkas disajikan pada Tabel 3.1

Tabel 3.1
Capaian IKU Sasaran Program Tahun 2018

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Sasaran Program 1 : Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara/Korporasi					
1.1	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan	%	60,00	62,60	104,33
1.2	Persentase BUMD yang kerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dievaluasi	%	9,00	9,09	101,01

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1.3	Persentase BLUD yang tata kelolanya minimal cukup baik dari BLUD yang dievaluasi	%	50,00	50,00	100
Sasaran Program 2 : Meningkatnya Efektivitas Hasil Pengawasan Keinvestigasian					
2.1	Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di persidangan	%	50,00	58,18	116,36
2.2	Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH	%	72,00	100	138,89
2.3	Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K	%	65,00	100	153,85
2.4	Persentase hasil audit penyesuaian harga yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K	%	75,00	0,00	0,00
Sasaran Program 3: Meningkatnya Penyelesaian Hambatan Pelaksanaan Pembangunan Nasional					
3.1	Persentase penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan	%	75,00	100	133,33
Sasaran Program 4: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah Dan Korporasi Dalam Pencegahan Korupsi					
4.1	Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP (termasuk FRA)	%	52,00	83,33	160,25
Sasaran Program 5: Meningkatnya Kepedulian K/L/P/K Dan Masyarakat Terhadap Korupsi					
5.1	Persentase K/L/P/K Anggota Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) yang mengimplementasikan Sistem Pengaduan Masyarakat	%	65,00	0,00	0,00
Sasaran Program 6: Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP Pemda					
6.1	Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP Level 3	%	100	100	100
6.2	Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas Level 3	%	59,00	59,00	100
6.3	Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas Level 2	%	41,00	5,88	14,35
Sasaran Program 7: Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda					
7.1	Persentase APIP Pemerintah Provinsi dengan Kapabilitas Level 3	%	100	0,00	0,00
7.2	Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/ Kota dengan Kapabilitas Level 3	%	35,00	0,00	0,00
7.3	Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/ Kota dengan Kapabilitas Level 2	%	65,00	118,18	100
Sasaran Program Dukungan Pengawasan : Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan atas Pelayanan Sekretariat Utama					
8.1	Kepuasan atas Pelayanan Sekretariat Utama (skala <i>likert</i> 1-10)	Skala	8	7,20	90

Uraian lebih lengkap tentang pencapaian kinerja sasaran program beserta realisasi anggarannya sebagaimana disajikan dalam **Lampiran I**.

1. ANALISIS CAPAIAN KINERJA PROGRAM

Analisis terhadap sasaran program dan masing-masing indikator kinerja program yang disajikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai berikut:

**Sasaran Program Pengawasan 1:
Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan
Keuangan Negara/ Korporasi**

Sasaran program perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara/korporasi merupakan capaian sasaran program yang diukur melalui 3 (tiga) IKU yang terkait langsung dengan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan program prioritas nasional dengan ringkasan target, realisasi dan capaian sebagaimana disajikan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2
Ringkasan Target, Realisasi dan Capaian IKU
Sasaran Program Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan
Pengelolaan Keuangan Negara/Korporasi

No.	IKU	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.1	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan	%	60	62,60	104,33
1.2	Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dievaluasi	%	9	9,09	101,01
1.3	Persentase BLUD yang tata kelolanya minimal cukup baik dari BLUD yang dievaluasi	%	50	50	100

Tabel 3.2 menunjukkan bahwa dari 3 (tiga) IKU yang mendukung capaian sasaran program “Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara/Korporasi”, 3 (tiga) IKU yang memiliki capaian 100% atau lebih.

Uraian masing-masing IKU sasaran program “Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara/Korporasi” sebagai berikut:

Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan

IKU “Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan” menggambarkan kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara dalam melaksanakan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan.

Indikator tersebut mencerminkan nilai kinerja yang diukur dengan rumus:

$$\frac{\text{Realisasi IKU Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan}}{\text{d TL Rekomendasi 2018}} = \frac{\text{d TL Rekomendasi 2018}}{\text{d Rekomendasi 2018}} \times 100\%$$

Realisasi IKU “Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan” tahun 2018 adalah sebesar 62,60% atau tercapai 104,33% dari target sebesar 60%, dengan perhitungan sebanyak 246 rekomendasi telah ditindaklanjuti dari 393 rekomendasi yang disampaikan pada tahun 2018.

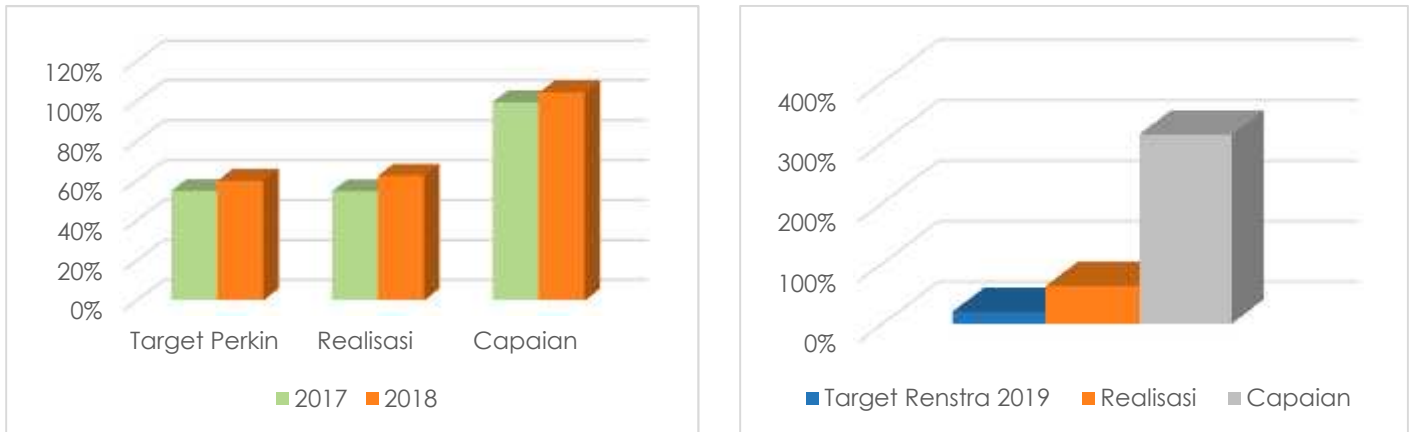
Realisasi IKU sampai dengan tahun 2018 sebesar 62,60% meningkat 7,79% dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sebesar 54,81%. Demikian pula dengan capaian IKU tahun 2018 meningkat 4,68% dibandingkan dengan capaian tahun 2017 sebesar 99,65%. Faktor pendukung meningkatnya realisasi maupun capaian IKU antara lain:

- a. Telah mengoptimalkan kegiatan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan sehingga diperoleh dokumen tindak lanjut yang lengkap dan valid.
- b. Adanya sinergi dengan APIP untuk penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan.

Jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra pada tahun 2019 sebesar 20%, maka realisasi IKU tahun 2018 mencapai 313%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja tahun 2018 perlu harus dipertahankan.

Perkembangan target, realisasi dan capaian IKU sampai dengan tahun 2018 dan target akhir Renstra tahun 2019 Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara disajikan pada Gambar 3.1.

Gambar 3.1.
Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja
Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan



1.2.

Persentase BUMD yang Kinerjanya Minimal Berpredikat Baik dari BUMD yang Dievaluasi

IKU “Persentase BUMD yang Kinerjanya Minimal Berpredikat Baik dari BUMD yang Dievaluasi” merupakan indikator kinerja yang diukur dengan rumus:

$$\text{Realisasi IKU Persentase BUMD yang Kinerjanya Minimal Berpredikat Baik dari BUMD yang Dievaluasi} = \frac{\text{d BUMD yang kinerjanya minimal baik/sehat 2018}}{\text{d BUMD yang dievaluasi 2018}} \times 100\%$$

Realisasi IKU “Persentase BUMD yang Kinerjanya Minimal Berpredikat Baik dari BUMD yang dievaluasi” tahun 2018 adalah sebesar 9,09% atau tercapai 101,01% dari target sebesar 9%, dengan perhitungan satu BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik/sehat tahun 2018 dari sebelas BUMD yang dievaluasi tahun 2018. Daftar predikat kinerja PDAM selengkapnya disajikan pada **Lampiran VII**.

Dari hasil evaluasi tahun 2018 diidentifikasi 5 (lima) permasalahan kinerja yang paling signifikan pada PDAM sebagaimana disajikan pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3
Permasalahan Kinerja PDAM

No.	Permasalahan	Jumlah PDAM
1.	Kemampuan finansial masih rendah karena belum mampu memperoleh keuntungan usaha	11
2.	Cakupan Pelayanan (Jumlah Pelanggan) masih rendah	11
3.	Kehilangan air tinggi	8
4.	Jam operasi layanan	7
5.	Rasio jumlah pegawai dibandingkan dengan jumlah pelanggan	6

Realisasi IKU tahun 2018 sebesar 9,09% lebih rendah 2,02% dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sebesar 11,11%. Namun demikian, capaian IKU tahun 2018 lebih tinggi 15,54% dibandingkan dengan capaian tahun 2017 sebesar 85,47%. Kondisi ini disebabkan BUMD yang dievaluasi pada tahun 2018 bertambah menjadi 11 (sebelas) dibandingkan tahun 2017 hanya 9 (sembilan) BUMD, sedangkan BUMD yang kinerjanya minimal baik/sehat tetap.

1.3.

Persentase BLUD yang Tata Kelolanya Minimal Cukup Baik dari BLUD yang Dievaluasi

IKU “Persentase BLUD yang Tata Kelolanya Minimal Cukup Baik dari BLUD yang Dievaluasi” merupakan indikator yang nilai kinerjanya diukur dengan rumus:

$$\text{Realisasi IKU Persentase BLUD yang Tata Kelolanya Minimal Cukup Baik dari BLUD yang Dievaluasi} = \frac{\text{d BLUD yang tata kelolanya minimal cukup baik 2018}}{\text{d BLUD yang dievaluasi 2018}} \times 100\%$$

Realisasi IKU “Persentase BLUD yang Tata Kelolanya Minimal Cukup Baik dari BLUD yang Dievaluasi” tahun 2018 adalah sebesar 50% atau tercapai 100% dari target sebesar 50%, dengan perhitungan sebanyak satu BLUD yang tata kelolanya minimal cukup baik tahun 2018 dari dua BLUD yang dievaluasi tahun 2018.

Tabel 3.4
Daftar Predikat Kinerja BLUD

No.	Nama BLUD	Predikat Kinerja	Skor Kinerja
1	RSUD Kota Kendari	Baik	70,64
2	RSUD Kabupaten Bombana	Sedang	55,40
3	RSUD Bahteramas	Baik	77,03

Terdapat 1 (satu) PP penugasan Evaluasi Kinerja RSD-BLUD Bahteramas yang merupakan PKP2T Tambahan.

Dari hasil evaluasi tahun 2018 diidentifikasi 5 (lima) permasalahan kinerja yang paling signifikan pada BLUD sebagaimana disajikan pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5
Permasalahan Kinerja BLUD

No.	Permasalahan	Jumlah BLUD
1.	Kinerja keuangan masih rendah	3
2.	Perencanaan, penganggaran, dan pelaporan belum memenuhi ketentuan	3
3.	Kebijakan dan prosedur belum sesuai ketentuan	3
4.	Kinerja SPM belum tercapai	3
5.	Kompetensi SDM belum memadai	3

Realisasi IKU sampai dengan tahun 2018 sebesar 50% meningkat 50% dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sebesar 0%. Demikian pula dengan capaian IKU tahun 2018 meningkat 100% dibandingkan dengan capaian tahun 2017 sebesar 0%. Faktor pendukung meningkatnya realisasi maupun capaian IKU antara lain adanya peningkatan/kesadaran BLUD dan pendampingan/asistensi BPKP untuk menerapkan tata kelola yang baik.

Sasaran Program Pengawasan 2: Meningkatnya Efektifitas Hasil Pengawasan Keinvestigasian

Sasaran program “Meningkatnya Efektivitas Hasil Pengawasan Keinvestigasian” merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2018 yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*) dari program teknis Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu pengawasan keinvestigasian.

Capaian sasaran program diukur melalui 4 (empat) IKU dengan ringkasan target, realisasi dan capaian sebagaimana disajikan pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6
Ringkasan Target, Realisasi dan Capaian
IKU Sasaran Program Pengawasan 2

No.	Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di persidangan	%	50,00	58,18	116,36
2	Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH	%	72,00	100	138,89
3	Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K	%	65,00	100	153,85
4	Persentase hasil audit penyesuaian harga yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K	%	75,00	0,00	0,00

Tabel 3.6 menunjukkan bahwa dari 4 (empat) IKU yang mendukung capaian sasaran program “Meningkatnya Efektivitas Hasil Pengawasan Keinvestigasian”, hanya 1 IKU yang memiliki capaian di bawah 100%.

Uraian masing-masing IKU sasaran program “Meningkatnya Efektivitas Hasil Pengawasan Keinvestigasian”, sebagai berikut:

2.1.

Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang Dimanfaatkan di Persidangan

IKU “Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang Dimanfaatkan di Persidangan” merupakan tingkat pemanfaatan laporan hasil pengawasan keinvestigasian berupa Laporan Hasil Audit Investigatif dan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) pada sidang di Pengadilan. Pengukuran kinerja dihitung berdasarkan jumlah Laporan Hasil Pemberian Keterangan Ahli di Pengadilan dibandingkan dengan Laporan Hasil Audit Investigatif dan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) yang diterbitkan selama 3 (tiga) tahun terakhir.

Indikator tersebut mencerminkan nilai kinerja yang diukur dengan rumus:

$$\text{Realisasi IKU Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di persidangan} = \frac{\text{d PKA Tahun 2018}}{\text{d LHAI+LHPKKN tiga tahun terakhir}} \times 100\%$$

Realisasi IKU “Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di persidangan” tahun 2018 adalah sebesar 58,18% atau tercapai 116,36% dari target sebesar 50%. Realisasi tersebut diperoleh dari

pelaksanaan 32 kali Pemberian Keterangan Ahli (PKA) di sidang Pengadilan pada tahun 2018 dibandingkan dengan 53 Laporan Hasil Pengawasan keinvestigasian, yaitu Laporan Hasil Audit Investigasi dan Laporan Hasil Pengawasan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) dalam 3 (tiga) tahun terakhir (2016, 2017, 2018). Realisasi IKU sampai dengan tahun 2018 sebesar 58,18% meningkat 15,53% dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sebesar 42,65%.

2.2.

Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang Dimanfaatkan oleh APH

IKU “Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang Dimanfaatkan oleh APH” merupakan tingkat pemanfaatan hasil audit investigatif oleh APH. Pengukuran kinerja dihitung berdasarkan jumlah Laporan Hasil Audit Investigatif yang dimanfaatkan oleh APH dibandingkan dengan jumlah Laporan Audit Investigatif yang diterbitkan.

Indikator tersebut mencerminkan nilai kinerja yang diukur dengan rumus:

$$\text{Realisasi IKU Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH} = \frac{\text{d LHAI yang ditindaklanjuti/dimanfaatkan APH 2018}}{\text{d LHAI yang terbit 2018}} \times 100\%$$

Realisasi IKU “Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang Dimanfaatkan oleh APH” tahun 2018 adalah sebesar 100% atau tercapai 138,89% dari target sebesar 72%, dengan perhitungan sebanyak 2 (dua) Laporan Hasil Audit Investigatif (LHAI) yang ditindaklanjuti dan dimanfaatkan oleh APH pada tahun 2018 dibandingkan dengan 2 (dua) LHAI yang diterbitkan pada tahun 2018. Realisasi IKU tahun 2018 tersebut sama dengan realisasi tahun 2017 sebesar 100%.

2.3.

Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang Dimanfaatkan oleh K/L/P/K

IKU “Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang Dimanfaatkan oleh K/L/P/K” merupakan tingkat pemanfaatan laporan hasil pengawasan keinvestigasian berupa Laporan Hasil Audit Investigatif, Laporan Hasil Pengawasan atas *current issues*, dan Laporan Hasil Pengawasan dalam rangka pemberian rekomendasi strategis kepada K/L/P/K untuk perbaikan

tata kelola dan/atau mencegah TPK berulang. Pengukuran kinerja dihitung berdasarkan jumlah Laporan Hasil Audit Investigatif, Laporan Hasil Pengawasan *current issues*, dan Laporan Hasil Pengawasan dalam rangka pemberian rekomendasi strategis yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K untuk perbaikan tata kelola dan/atau mencegah TPK berulang dibandingkan dengan jumlah Laporan Hasil Pengawasan keinvestigasian yang diterbitkan.

Indikator tersebut mencerminkan nilai kinerja yang diukur dengan rumus:

$$\text{Realisasi IKU Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K} = \frac{\text{d LHP Keinvestigasian yang TL/dimanfaatkan oleh K/L/P/K tahun berjalan}}{\text{d LHP Keinvestigasian yang terbit pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

Realisasi IKU “Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang Dimanfaatkan oleh K/L/P/K” tahun 2018 adalah sebesar 100% atau tercapai 153,85% dari target sebesar 65%, dengan perhitungan sebanyak satu Laporan Hasil Pengawasan keinvestigasian (LHAI + Laporan Hasil Pengawasan atas *Current Issues* + Laporan Hasil Pengawasan dalam rangka Pemberian Rekomendasi Strategis/RS) yang ditindaklanjuti dan dimanfaatkan oleh K/L/P/K pada tahun 2018 dibandingkan dengan 1 (satu) Laporan Hasil Pengawasan keinvestigasian yang diterbitkan pada tahun 2018. Realisasi IKU tahun 2018 tersebut sama dengan realisasi tahun 2017 sebesar 100%.

2.4.

Persentase Hasil Audit Penyesuaian Harga yang Dimanfaatkan oleh K/L/P/K

IKU “Persentase Hasil Audit Penyesuaian Harga yang Dimanfaatkan oleh K/L/P/K” merupakan tingkat pemanfaatan hasil audit penyesuaian harga oleh penanggung jawab kegiatan atau pengguna barang/jasa untuk pengambilan keputusan penyesuaian harga. Pengukuran kinerja dihitung berdasarkan Jumlah Laporan Hasil Audit Penyesuaian Harga yang dimanfaatkan oleh penanggung jawab kegiatan atau pengguna barang/jasa dibandingkan dengan jumlah Laporan Hasil Audit Penyesuaian Harga yang diterbitkan.

Indikator tersebut mencerminkan nilai kinerja yang diukur dengan rumus:

$$\text{Realisasi IKU Persentase hasil audit penyesuaian harga yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K} = \frac{\text{d LHA Eskalasi harga yang ditindaklanjuti 2018}}{\text{d LHA Eskalasi harga 2018}} \times 100\%$$

Realisasi IKU “Persentase Hasil Audit Penyesuaian Harga yang Dimanfaatkan oleh K/L/P/K” tahun 2018 adalah sebesar 0% atau tercapai 0% dari target sebesar 75%, karena tidak ada Laporan Hasil Audit Penyesuaian Harga yang terbit selama tahun 2018 dan ditindaklanjuti oleh penanggung jawab kegiatan. Hal ini disebabkan tidak ada pelaksanaan kontrak pada K/L/P/K yang mengajukan permintaan penyesuaian harga.

Untuk meningkatkan kinerja IKU agar dapat mencapai target tahun 2019, maka Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara akan lebih aktif menjalin komunikasi dengan *stakeholder* di wilayah Sulawesi Tenggara, serta dengan Kedeputan Investigasi di BPKP Pusat.

Sasaran Program Pengawasan 3: Meningkatnya Penyelesaian Hambatan Pelaksanaan Pembangunan Nasional

Sasaran program “Meningkatnya Penyelesaian Hambatan Pelaksanaan Pembangunan Nasional” merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2018 yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*) dari program teknis Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu pengawasan intern penyelesaian hambatan pelaksanaan pembangunan.

Sasaran program “Meningkatnya penyelesaian hambatan pelaksanaan pembangunan nasional” didukung oleh capaian 1 (satu) IKU yaitu “Persentase penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan”. Uraian capaian IKU sebagai berikut:

3.1

Persentase Penyelesaian Hambatan Kelancaran Pembangunan

IKU “Persentase Penyelesaian Hambatan Kelancaran Pembangunan” merupakan tingkat pemanfaatan hasil evaluasi hambatan kelancaran pembangunan untuk menyelesaikan masalah yang menghambat kelancaran

program/kegiatan pembangunan. Pengukuran kinerja dihitung berdasarkan jumlah Laporan Hasil Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan (EHKP) yang ditindaklanjuti kesepakatannya oleh para pihak dibandingkan jumlah Laporan Hasil EHKP yang diterbitkan.

Indikator tersebut mencerminkan nilai kinerja yang diukur dengan rumus:

$$\frac{\text{Realisasi IKU Persentase penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan}}{\text{d LEHKP ditindaklanjuti 2018}} = \frac{\text{d LEHKP ditindaklanjuti 2018}}{\text{d LEHKP 2018}} \times 100\%$$

Realisasi IKU “Persentase Penyelesaian Hambatan Kelancaran Pembangunan” tahun 2018 adalah sebesar 100% atau tercapai 133,33% dari target sebesar 75%, dengan perhitungan satu Laporan Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan (EHKP) yang ditindaklanjuti kesepakatannya oleh para pihak pada tahun 2018 dibandingkan dengan satu Laporan EHKP pada tahun 2018.

Realisasi IKU sampai dengan tahun 2018 sebesar 100% meningkat 100% dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sebesar 0%. Demikian pula dengan capaian IKU tahun 2018 meningkat 133,33% dibandingkan dengan capaian tahun 2017 sebesar 0%.

**Sasaran Program Pengawasan 4:
Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintah dan Korporasi dalam Pencegahan Korupsi**

Sasaran program “Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah dan Korporasi dalam Pencegahan Korupsi” merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2018 yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*) dari program teknis Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu pengawasan intern *Fraud Control Plan* (FCP).

Sasaran program didukung oleh capaian satu IKU yaitu “Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP (termasuk FRA)”. Capaian IKU diuraikan sebagai berikut:

Persentase K/L/P/K yang Mengimplementasikan FCP (Termasuk FRA)

IKK “Persentase K/L/P/K yang Mengimplementasikan FCP (Termasuk FRA)” merupakan tingkat penyelesaian penugasan *Fraud Control Plan* (FCP) termasuk *Fraud Risk Assesment* (FRA) baik atas permintaan K/L/P/K dan/atau inisiatif sendiri pada salah satu dari tahapan Sosialisasi, *Diagnostic Assesment*, Bimbingan Teknis Implementasi, Evaluasi, dan Monitoring yang dapat ditindaklanjuti dan dimanfaatkan oleh K/L/P/K. Pengukuran kinerja dihitung berdasarkan jumlah K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP dibandingkan dengan jumlah penugasan FCP dilaksanakan (Sosialisasi + *Diagnostic Assesment* + Bimbingan Teknis Implementasi + Evaluasi + Monitoring) termasuk FRA.

Indikator tersebut mencerminkan nilai kinerja yang diukur dengan rumus:

$$\text{Realisasi IKU Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP (termasuk FRA)} = \frac{\text{d K/L/P/K yang IMPL FCP/FRA tahun berjalan}}{\text{d Penugasan yang telah dilakukan pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

Realisasi IKU “Persentase K/L/P/K yang Mengimplementasikan FCP (Termasuk FRA)” tahun 2018 adalah sebesar 83,33% atau tercapai 160,26% dari target sebesar 52%, dengan perhitungan 5 (lima) K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP termasuk FRA pada tahun 2018 dibandingkan dengan enam penugasan yang telah dilakukan (Sosialisasi + *Diagnostic Assesment* + Bimbingan Teknis Implementasi + Evaluasi + Monitoring) termasuk FRA pada tahun 2018.

Realisasi IKU sampai dengan tahun 2018 sebesar 83,33% meningkat 33,33% dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sebesar 50%. Demikian pula dengan capaian IKU tahun 2018 meningkat 60,26% dibandingkan dengan capaian tahun 2017 sebesar 100%.

Sasaran Program Pengawasan 5: Meningkatnya Kepedulian K/L/P/K dan Masyarakat terhadap Korupsi

Sasaran program “Meningkatnya Kepedulian K/L/P/K dan Masyarakat terhadap Korupsi” merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2018 yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*) dari program teknis Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu pengawasan intern peningkatan kepedulian K/L/P/K dan masyarakat terhadap korupsi.

Sasaran program didukung oleh capaian satu IKU yaitu “Persentase K/L/P/K Anggota Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) yang mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat”.

Uraian capaian IKU sasaran program “Meningkatnya Kepedulian K/L/P/K dan Masyarakat terhadap Korupsi” ini adalah:

5.1.

Persentase K/L/P/K Anggota Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) yang Mengimplementasikan Sistem Pengaduan Masyarakat

IKU “Persentase K/L/P/K Anggota Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) yang Mengimplementasikan Sistem Pengaduan Masyarakat” merupakan rasio K/L/P/K atau unit kerja eselon I/II di lingkungan K/L/P atau unit kerja setara di lingkungan Korporasi yang memenuhi 3 (tiga) unsur kriteria, yaitu:

- a. Mempunyai Daftar Risiko *Fraud* yang terungkap dari hasil kegiatan pembelajaran KomPAK.
- b. Mempunyai rencana penanganan risiko *fraud* yang dibahas bersama dengan anggota KomPAK.
- c. Mempunyai peraturan K/L/P/K mengenai sistem pengaduan masyarakat/*whistleblowing*, atau belum mempunyai peraturan K/L/P/L mengenai sistem pengaduan masyarakat/*whistleblowing*, namun menyatakan kesediaannya untuk dilakukan bimtek pengembangan sistem pengaduan masyarakat/*whistleblowing*.

Dibandingkan dengan K/L/P/K atau unit kerja eselon I/II di lingkungan K/L/P atau unit kerja setara di lingkungan Korporasi yang telah menjadi anggota dari Komunitas Pembelajar Anti Korupsi.

Indikator tersebut mencerminkan nilai kinerja yang diukur dengan rumus:

$$\frac{\text{Realisasi IKU Persentase K/L/P/K Anggota Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) yang mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat}}{\text{d K/L/P/K atau unit kerja yang memenuhi 3 unsur kriteria}} = \frac{\text{d K/L/P/K atau unit kerja yang telah menjadi anggota KPAK}}{\text{d K/L/P/K atau unit kerja yang telah menjadi anggota KPAK}} \times 100\%$$

Realisasi IKU “Persentase K/L/P/K Anggota Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) yang mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat” tahun 2018 adalah sebesar 0% atau tercapai 0% dari target sebesar 65%, dengan perhitungan tidak ada K/L/P/K atau unit kerja eselon I/II di lingkungan K/L/P atau unit kerja setara di lingkungan Korporasi yang telah memenuhi 3 (tiga) unsur kriteria dibandingkan dengan 8 (delapan) K/L/P/K atau unit kerja eselon I/II di lingkungan K/L/P atau unit kerja setara di lingkungan Korporasi yang telah menjadi anggota dari Komunitas Pembelajar Anti Korupsi. Hal ini disebabkan kurangnya komitmen anggota Komunitas Pembelajar Anti Korupsi untuk mengembangkan sistem pengaduan masyarakat (*Internal Whistle Blowing System*) di lingkungan unit kerjanya.

Untuk meningkatkan kinerja IKU agar dapat mencapai target tahun 2019, maka Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara akan melaksanakan kegiatan pengembangan Komunitas Pembelajar Anti Korupsi dan lebih aktif mendorong anggota Komunitas Pembelajar Anti Korupsi untuk dapat mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat di unit kerjanya.

Sasaran Program Pengawasan 6: Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP Pemda

Sasaran program “Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda” dilengkapi dengan empat indikator kinerja utama yang capaiannya pada tahun 2018 disajikan pada Tabel 3.7.

Tabel 3.7
Ringkasan Target, Realisasi dan Capaian
Indikator Kinerja Sasaran Program Meningkatnya Kualitas
Penerapan SPIP Pemda

No.	Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
6.1	Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP Level 3	%	100	100	100
6.2	Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas Level 3	%	59	59	100
6.3	Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas Level 2	%	41	5,88	14,35

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa dari 3 (tiga) IKU yang mendukung capaian sasaran program “Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda”, 2 (dua) IKU yang memiliki capaian 100%.

Dari hasil penilaian tahun 2018 diidentifikasi 9 (sembilan) sub unsur yang masih memerlukan perbaikan sebagai berikut:

No.	No. Sub Unsur	Sub Unsur	Jumlah Pemda
1.	1.1	Penegakan Integritas dan Etika	6
2.	1.2	Komitmen Terhadap Kompetensi	6
3.	1.7	Peran APIP yang Efektif	6
4.	2.1	Identifikasi Risiko	12
5.	2.2	Analisis Risiko	12
6.	3.5	Penetapan dan Reviu Indikator	6
7.	3.11	Dokumentasi SPI	11
8.	5.1	Pemantauan Berkelanjutan	6
9.	5.2	Evaluasi Terpisah	6

Perkembangan tingkat maturitas SPIP sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 disajikan pada Tabel 3.8.

Tabel 3.8.
Tingkat maturitas SPIP Pemda Tahun 2015 s.d. 2018

No.	Level	Jumlah Pemda			
		2015	2016	2017	2018
1	0	5	3	1	0
2	1	13	11	10	6
3	2	0	3	1	1
4	3	0	0	6	11
Jumlah		13	15	17	18

Daftar nama pemda dengan skor dan level maturitas SPIP pada tahun 2018 selengkapnya disajikan pada **Lampiran V**.

Uraian capaian masing-masing IKU sebagai berikut:

6.1.

Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP Level 3

IKU “Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP Level 3” merupakan capaian Maturitas SPIP Level 3 untuk Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Indikator tersebut mencerminkan nilai kinerja yang diukur dengan rumus:

$$\frac{\text{Realisasi IKU Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP Level 3}}{\text{d Pemprov Min Level 3 SPIP d seluruh Pemprov}} \times 100\%$$

Realisasi IKU “Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP Level 3” tahun 2018 adalah sebesar 100% atau tercapai 100% dari target sebesar 100%.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara berada pada Level 3 Maturitas SPIP dengan skor maturitas sebesar 3,060 atau dalam kategori “terdefinisi”. Skor tersebut merupakan hasil reviu oleh tim Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara, saat ini masih dalam proses pengusulan QA oleh pusat dengan Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor S-1677/PW20/3/2018 tanggal 4 Desember 2018.

Jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra pada tahun 2019 sebesar 100%, maka realisasi IKU tahun 2018 mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja tahun 2018 harus dipertahankan untuk mencapai target 2019.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja IKU agar dapat mencapai target tahun 2019 antara lain:

- a. Mengupayakan untuk mengikuti QA oleh rendal.
- b. Melakukan asistensi untuk sub unsur SPIP yang berpotensi menghambat pencapaian target.
- c. Melengkapi bukti-bukti administrasi untuk mendukung sub unsur yang bernilai 1 dan 2.

**Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP
Level 3**

IKU “Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 3” merupakan capaian atas Maturitas SPIP Kabupaten/Kota yang berada pada Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara yang memiliki skor 3.

Indikator tersebut mencerminkan nilai kinerja yang diukur dengan rumus:

$$\frac{\text{Realisasi IKU Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 3}}{\text{d Pemkab/kota Min Level 3 SPIP}} = \frac{\text{d seluruh Pemkab/kota}}{\text{d seluruh Pemkab/kota}} \times 100\%$$

Realisasi IKU “Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 3” tahun 2018 adalah sebesar 59% atau mencapai 100% dari target sebesar 59%, dengan perhitungan 10 (sepuluh) Pemerintah Kabupaten/Kota dengan maturitas SPIP minimal level 3 dibandingkan dengan 17 (tujuh belas) Pemerintah Kabupaten/Kota yang menjadi mitra Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pemerintah Kabupaten/Kota yang sudah mencapai minimal level 3 sebagai berikut:

No.	Nama Pemda	Skor	Level	Status
1.	Kota Kendari	3,106	3	Terdefinisi
2.	Kabupaten Kolaka	3,083	3	Terdefinisi
3.	Kabupaten Konawe	3,049	3	Terdefinisi
4.	Kabupaten Kolaka Utara	3,278	3	Terdefinisi
5.	Kabupaten Wakatobi	3,128	3	Terdefinisi
6.	Kabupaten Buton	3,081	3	Terdefinisi
7.	Kabupaten Konawe Selatan	3,036	3	Terdefinisi
8.	Kabupaten Bombana	3,098	3	Terdefinisi
9.	Kota Baubau	3,063	3	Terdefinisi
10.	Kabupaten Muna	3,083	3	Terdefinisi

Dari 10 (sepuluh) kabupaten/kota di atas, skor hasil *self assesment* sebanyak 3 (tiga) pemda, skor hasil reviu perwakilan sebanyak 6 (enam) pemda, dan hasil QA rendal pusat sebanyak 3 (tiga) pemda. Terhadap 6 (enam) pemda yang direviu oleh perwakilan, saat ini masih dalam proses pengusulan QA oleh pusat dengan Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor S-1677/PW20/3/2018 tanggal 4 Desember 2018 (Pemkab Muna, Pemkab Wakatobi, Pemkab Bombana, Pemkab Kolaka

Utara) dan S-1928/PW20/3/2018 tanggal 28 Desember 2018 (Pemkot Kendari dan Pemkab Buton).

Realisasi IKU sampai dengan tahun 2018 sebesar 59% meningkat 35,29% dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sebesar 29,41%. Demikian pula dengan capaian IKU tahun 2018 meningkat 100% dibandingkan dengan capaian tahun 2017 sebesar 101,42%.

Faktor pendukung meningkatnya realisasi maupun capaian IKU adalah Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara memprioritaskan penggunaan anggaran pembinaan SPIP pada Pemerintah Kabupaten/Kota yang akan mencapai maturitas SPIP ke Level 3.

Jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra pada tahun 2019 sebesar 100%, maka realisasi IKU tahun 2018 mencapai 59%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja tahun 2018 perlu ditingkatkan.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja IKU agar dapat mencapai target tahun 2019 antara lain:

- a. Mengupayakan untuk mengikuti QA oleh rendal.
- b. Melakukan asistensi untuk sub unsur SPIP yang berpotensi menghambat pencapaian target.
- c. Melengkapi bukti-bukti administrasi untuk mendukung sub unsur yang bernilai 1 dan 2.

6.3.

Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 2

IKU “Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 2” merupakan capaian atas Maturitas SPIP Kabupaten/Kota yang berada pada wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara yang memiliki skor 2.

Indikator tersebut mencerminkan nilai kinerja yang diukur dengan rumus:

$$\frac{\text{Realisasi IKU Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 2}}{\text{d Pemkab/kota Min Level 2 SPIP}} = \frac{\text{d seluruh Pemkab/kota}}{\text{d seluruh Pemkab/kota}} \times 100\%$$

Realisasi IKU “Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 2” tahun 2018 adalah sebesar 5,88% atau mencapai 14,35% dari target sebesar 41%, dengan perhitungan 1 (satu) Pemerintah Kabupaten

dengan maturitas SPIP minimal level 2 dibandingkan dengan 17 (tujuh belas) Pemerintah Kabupaten/Kota yang menjadi mitra Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pemerintah Kabupaten yang sudah mencapai level 2 adalah Kabupaten Buton Tengah dengan skor 2,005 atau “berkembang” yang merupakan hasil *self assessment*.

Realisasi IKU sampai dengan tahun 2018 sebesar 5,88% sama dengan realisasi tahun 2017 sebesar 5,88%. Demikian pula dengan capaian IKU tahun 2018 meningkat 14,35% dibandingkan dengan capaian tahun 2017 sebesar 11,09%.

Beberapa hal lain yang menjadi kendala dalam peningkatan capaian maturitas SPIP pada Pemerintah Kabupaten/Kota, yaitu:

- a. Pemda belum menetapkan target maturitas SPIP dalam RPJMD sehingga penerapan SPIP masih belum menjadi prioritas pemda.
- b. Kurangnya komitmen pemda dalam penerapan SPIP.
- c. Kurangnya pemahaman SDM SKPD dan APIP dalam penyelenggaraan SPIP dan penyiapan dokumen peningkatan maturitas SPIP.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja IKU agar dapat mencapai target tahun 2019 antara lain:

- a. Komunikasi yang lebih efektif dan proaktif dengan Kepala Daerah dan satgas SPIP Pemerintah Daerah se-wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara guna memonitor pemenuhan sub unsur yang diperlukan.
- b. BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara telah melakukan FGD penyusunan risiko untuk mendukung unsur kedua pada bulan April tahun 2018.
- c. Melakukan bimtek/asistensi terhadap pemenuhan dokumen seluruh sub unsur SPIP.

**Sasaran Program Pengawasan 7:
Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah Daerah**

Sasaran program “Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah Daerah” sebagai salah satu fungsi manajemen pada organisasi

penyelenggaraan pemerintahan, memegang peran penting dalam mengawal dan mengoptimalkan kinerja dan pencapaian tujuan organisasi baik kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah harus didukung dengan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang memadai sesuai praktik terbaik yang berlaku secara internasional. Pemerintah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 menginginkan 85% APIP berada pada Level 3 pada tahun 2019.

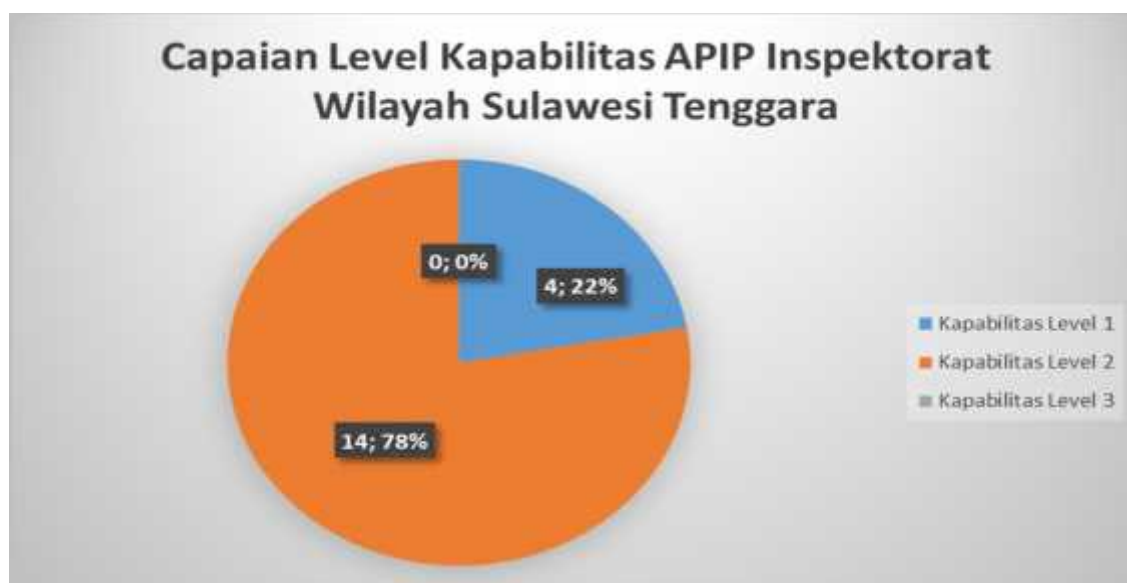
Sasaran program didukung 3 (tiga) indikator kinerja utama yang capaiannya pada tahun 2018 disajikan pada Tabel 3.9.

Tabel 3.9
Ringkasan Target, Realisasi dan Capaian
Indikator Kinerja Sasaran Program Meningkatnya Kapabilitas APIP
se-Provinsi Sulawesi Tenggara

No.	Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
7.1	Persentase APIP Pemerintah Provinsi dengan Kapabilitas Level 3	%	100	0	0
7.2	Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/ Kota dengan Kapabilitas Level 3	%	35	0	0
7.3	Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/ Kota dengan Kapabilitas Level 2	%	65	118,18	100

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa dari 3 (tiga) IKU yang mengindikasikan sasaran program “Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah Daerah” adalah IKU nomor 7.3 yang memiliki nilai capaian *outcome* 100% atau lebih. Dari 18 (delapan belas) APIP di Provinsi Sulawesi Tenggara, sebanyak 14 (empat belas) APIP dengan Kapabilitas Level 2 dan sebanyak 4 (empat) APIP dengan Kapabilitas Level 1. Sampai dengan 31 Desember 2018 belum ada APIP dengan Kapabilitas Level 3.

Gambar 3.2
Capaian Level Kapabilitas APIP
Inspektorat Provinsi, Kabupaten, dan Kota se-Sulawesi Tenggara



Dari hasil identifikasi diketahui ada 8 (delapan) pernyataan yang memerlukan perbaikan yaitu:

No.	Pernyataan	KPA	Jumlah APIP
1.	Kami telah memberikan pengaruh terhadap perubahan ke arah peningkatan efektivitas, efisiensi, dan peningkatan kinerja organisasi.	Audit Kinerja/ Program Evaluasi	15
2.	Kami telah mengidentifikasi unit kerja auditi yang memiliki risiko tertinggi.	Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko	17
3.	Kami telah menentukan probabilitas terjadinya risiko yang signifikan yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan unit kerja auditi.	Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko	17
4.	Kami telah mengidentifikasi alternatif penanganan risiko yang dilakukan oleh manajemen.	Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko	17
5.	Kami telah menyusun PKPT yang berbasis risiko (berdasar hasil penilaian risiko auditi).	Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko	17
6.	Dilakukannya komunikasi informasi mengenai risiko dan pengendaliannya kepada Pimpinan Kementerian /Lembaga /Pemda.	Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko	17
7.	Kami telah merekomendasikan dan memberikan kontribusi dalam membangun mekanisme/proses yang tepat dalam rangka pengawasan dan pemberian saran oleh jajaran pimpinan K/L/Pemda terkait dengan kegiatan kami.	Pengawasan Manajemen terhadap Kegiatan APIP	17
8.	Adanya penguatan independensi, obyektivitas, dan efektivitas unit kerja kami melalui dukungan nyata dari jajaran pimpinan organisasi K/L/Pemda.	Pengawasan Manajemen terhadap Kegiatan APIP	17

Perkembangan tingkat kapabilitas APIP sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 disajikan pada Tabel 3.10.

Tabel 3.10
Tingkat Kapabilitas APIP Pemda tahun 2015 s.d. 2018

No.	Level	Jumlah Pemda			
		2015	2016	2017	2018
1	1	18	10	11	4
2	2	0	8	7	14
3	3	0	0	0	0
	Jumlah APIP	18	18	18	18

Daftar nama dan level kapabilitas APIP Pemerintah Daerah pada tahun 2018 disajikan pada **Lampiran VI**.

Uraian capaian IKU sasaran program sebagai berikut:

7.1.

Persentase APIP Pemerintah Provinsi dengan Kapabilitas Level 3

IKU “Persentase APIP Pemerintah Provinsi dengan Kapabilitas Level 3” merupakan capaian Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk mencapai Kapabilitas APIP Level 3.

Realisasi IKU “Persentase APIP Pemerintah Provinsi dengan Kapabilitas Level 3” tahun 2018 adalah 0% dari target sebesar 100%.

Tidak tercapainya IKU disebabkan oleh:

- a. Pemda belum menetapkan target Kapabilitas APIP dalam RPJMD sehingga penerapan Kapabilitas APIP masih belum menjadi prioritas pemda.
- b. Kurangnya komitmen pemda dalam Peningkatan Kapabilitas APIP.
- c. Kurangnya pemahaman SDM APIP dalam penyelenggaraan Peningkatan Kapabilitas APIP dan penyiapan dokumen peningkatan Kapabilitas APIP.
- d. Beberapa indikator capaian Kapabilitas APIP level 3 tidak hanya dapat dicapai melalui pemenuhan Infrastruktur Kapabilitas APIP saja, tetapi perlu penerapan dari seluruh Infrastruktur yang telah dibuat dalam kegiatan organisasi.
- e. Keterbatasan SDM APIP menyebabkan satuan tugas peningkatan kapabilitas APIP yang dibentuk tidak bisa bertugas secara optimal,

sehingga penyiapan infrastruktur peningkatan kapabilitas APIP menjadi terhambat.

Jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra pada tahun 2019 sebesar 100%, maka realisasi IKU tahun 2018 sebesar 0% menunjukkan bahwa kinerja tahun 2018 perlu ditingkatkan agar pada tahun 2019 IKU “Persentase APIP Pemerintah Provinsi dengan Kapabilitas Level 3” dapat mencapai target sesuai dengan Renstra.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja IKU agar dapat mencapai target tahun 2019 antara lain:

- a. Melakukan komunikasi dengan Kepala Daerah dan Inspektur agar Peningkatan Kapabilitas APIP menjadi prioritas Pemerintah Provinsi.
- b. Melaksanakan pelatihan/*workshop* untuk Inspektorat Daerah terkait pemenuhan elemen yang menjadi hambatan bagi peningkatan kapabilitas APIP.

7.2.

Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas Level 3

IKU “Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas Level 3” merupakan capaian Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Tenggara untuk mencapai Kapabilitas APIP Level 3.

Indikator tersebut mencerminkan nilai kinerja yang diukur dengan rumus:

$$\text{Realisasi IKU Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas Level 3} = \frac{\text{d APIP Pemkab/kota Min Level 3 APIP}}{\text{d Seluruh APIP Pemkab/kota}} \times 100\%$$

Realisasi IKU “Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas Level 3” tahun 2018 adalah sebesar 0% atau tercapai 0% dari target sebesar 35%, dimana dari 17 (tujuh belas) APIP Pemerintah Kabupaten/Kota yang menjadi mitra Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara belum ada APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP Level 3.

Tidak tercapainya IKU Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara disebabkan oleh:

- a. Pemda belum menetapkan target Kapabilitas APIP dalam RPJMD sehingga penerapan Kapabilitas APIP masih belum menjadi prioritas pemda.
- b. Kurangnya komitmen pemda dalam Peningkatan Kapabilitas APIP.
- c. Kurangnya pemahaman SDM APIP dalam penyelenggaraan Peningkatan Kapabilitas APIP dan penyiapan dokumen peningkatan Kapabilitas APIP.
- d. Beberapa indikator capaian Kapabilitas APIP level 3 tidak hanya dapat dicapai melalui pemenuhan Infrastruktur Kapabilitas APIP saja, tetapi juga perlu penerapan dari seluruh Infrastruktur yang telah dibuat dalam kegiatan organisasi.
- e. Keterbatasan SDM APIP menyebabkan satuan tugas peningkatan kapabilitas APIP yang dibentuk tidak bisa bertugas secara optimal, sehingga penyiapan infrastruktur peningkatan kapabilitas APIP menjadi terhambat.

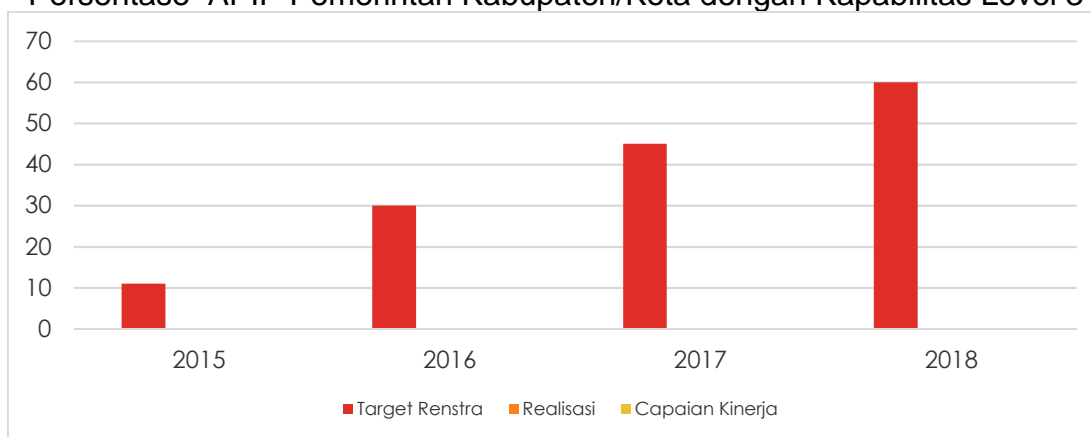
Jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra pada tahun 2019 sebesar 85%, maka realisasi IKU tahun 2018 sebesar 0% menunjukkan bahwa kinerja tahun 2018 perlu ditingkatkan agar pada tahun 2019 IKU "Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas Level 3" dapat mencapai target sesuai dengan Renstra.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja IKU agar dapat mencapai target tahun 2019 antara lain:

- a. Melakukan komunikasi dengan Kepala Daerah agar peningkatan Kapabilitas APIP menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten/Kota.
- b. Melaksanakan pelatihan/*workshop* untuk Inspektorat Daerah terkait pernyataan yang menjadi hambatan bagi peningkatan kapabilitas.

Perkembangan target, realisasi, dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2018 dan target akhir Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2019 disajikan pada Gambar 3.3

Gambar 3.3
Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja
Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas Level 3



7.3.

Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas Level 2

IKU “Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas Level 2” merupakan capaian Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Tenggara untuk mencapai Kapabilitas APIP Level 2.

Indikator tersebut mencerminkan nilai kinerja yang diukur dengan rumus:

$$\frac{\text{Realisasi IKU Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas Level 2}}{\text{d APIP Pemkab/kota Min Level 2 APIP d Seluruh APIP Pemkab/kota}} = \frac{\text{d APIP Pemkab/kota Min Level 2 APIP}}{\text{d Seluruh APIP Pemkab/kota}} \times 100\%$$

Realisasi IKU “Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas Level 2” tahun 2018 adalah sebesar 118,18% atau 100% dari target sebesar 65%, dimana terdapat 13 (tiga belas) APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan kapabilitas level 2 dari 17 APIP Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Tenggara. Realisasi IKU “Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas Level 2” melebihi target disebabkan hasil *Quality Assurance* pada 6 (enam) APIP Pemerintah Kabupaten/Kota yang menjadi target Kapabilitas APIP Level 3 berada pada Level 2.

APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan capaian Kapabilitas APIP Level 2 sebagai berikut:

No.	Nama APIP	Level	Status
1.	Kota Baubau	2	QA Perwakilan
2.	Kota Kendari	2	QA Perwakilan
3.	Kabupaten Bombana	2	QA Perwakilan
4.	Kabupaten Buton Utara	2	Reviu Rendal
5.	Kabupaten Kolaka	2	QA Perwakilan
6.	Kabupaten Kolaka Timur	2	QA Perwakilan
7.	Kabupaten Kolaka Utara	2	QA Perwakilan
8.	Kabupaten Konawe	2	QA Perwakilan
9.	Kabupaten Konawe Selatan	2	Reviu Rendal
10.	Kabupaten Konawe Kepulauan	2	QA Perwakilan
11.	Kabupaten Konawe Utara	2	QA Perwakilan
12.	Kabupaten Muna	2	Reviu Rendal
13.	Kabupaten Wakatobi	2	QA Perwakilan

Realisasi IKU “Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas Level 2” sampai dengan tahun 2018 sebesar 118,18% meningkat 82,89% dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sebesar 35,29%. Demikian pula dengan capaian IKU tahun 2018 meningkat 13,93% dibandingkan dengan capaian tahun 2017 sebesar 86,07%. Faktor pendukung meningkatnya realisasi maupun capaian IKU antara lain karena terdapat 6 (enam) kabupaten/kota yang tidak mencapai Kapabilitas Level 3. Selain itu, pada tahun 2018 Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan *Quality Assurance* pada 16 (enam belas) Kabupaten/Kota sehingga meningkatkan capaian Kapabilitas Level 2.

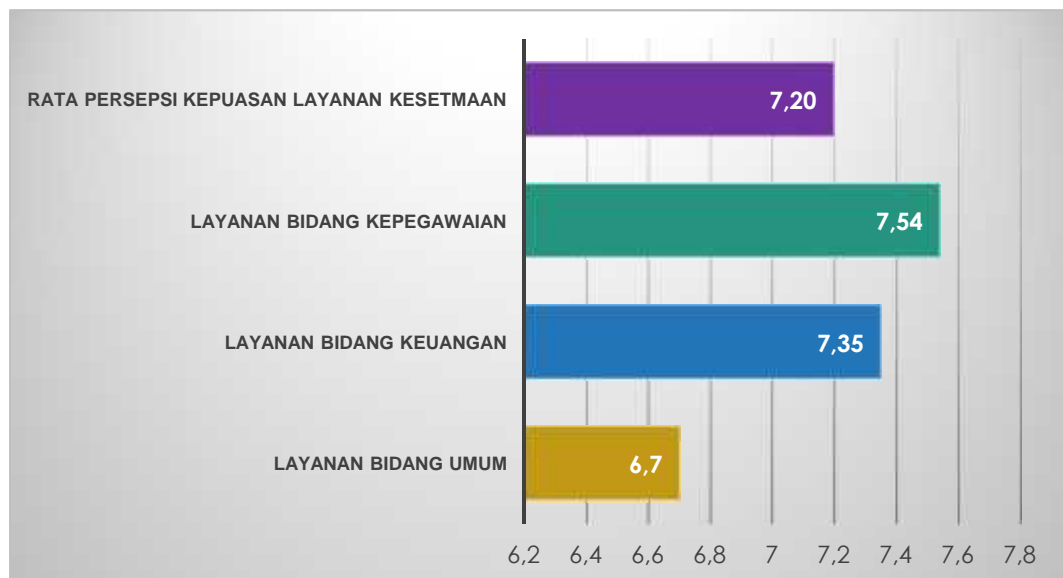
**Sasaran Program Dukungan Pengawasan
Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan Atas Pelayanan Sekretariat
Utama**

Sasaran program “Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan atas Pelayanan Sekretariat Utama” didukung dengan satu IKU “Kepuasan atas Pelayanan Tata Usaha dengan target 8 Skala 1-10”. Persepsi kepuasan terhadap suatu pelayanan sangat bergantung pada suatu keadaan ketika keinginan,

harapan, dan kebutuhan para penerima layanan dapat terpenuhi. Pernyataan puas atau tidak puas diperoleh melalui survei dengan menyebarkan kuesioner kepada para penerima layanan, dalam hal ini pegawai, dari seluruh unit kerja di lingkungan BPKP secara uji petik dan dihitung menggunakan metode skala 1-10. Survei yang dilakukan meliputi 3 (tiga) bidang layanan yaitu umum, kepegawaian, dan keuangan.

Realisasi IKU “Kepuasan atas Pelayanan Sekretariat Utama” sebesar 7,20 skala atau mencapai 90% dari target tahun 2018 sebesar 8 skala. Capaian tersebut merupakan rata-rata capaian persepsi kepuasan pada 3 (tiga) bidang layanan sebagaimana disajikan pada Gambar 3.4.

Gambar 3.4
Capaian Kinerja IKU
Kepuasan atas Pelayanan Sekretariat Utama Tahun 2018



Capaian IKU sebesar 7,20% menunjukkan bahwa layanan belum memenuhi target harapan *stakeholders*.

Belum tercapainya target IKU antara lain disebabkan:

- Pengelolaan layanan kearsipan melalui penggunaan aplikasi DMS belum optimal.
- Distribusi dalam persuratan belum tepat waktu.
- Kebutuhan belanja modal belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pegawai.
- Penyelesaian pertanggungjawaban keuangan serta penyediaan media informasi terkait keuangan belum tepat waktu.

- e. Belum melakukan pemutakhiran data kepegawaian secara *real time* melalui aplikasi SISPEDAP.

Upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian IKU antara lain:

- a. Mengoptimalkan aplikasi DMS dalam pengelolaan layanan kearsipan.
- b. Menyusun SOP Distribusi Persuratan.
- c. Menyusun Rencana Kebutuhan Barang (RKB).
- d. Percepatan waktu penyelesaian pertanggungjawaban keuangan serta penyediaan media informasi terkait keuangan.
- e. Pemutakhiran data kepegawaian secara *real time* melalui aplikasi SISPEDAP.

Realisasi IKU tahun 2018 sebesar 7,20 lebih rendah 2,3 dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sebesar 7,43. Demikian pula dengan capaian IKU tahun 2018 lebih rendah 16,14% dibandingkan dengan capaian tahun 2017 sebesar 106,14%. Kondisi ini disebabkan adanya penurunan kualitas pelayanan kesekretariatan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara.

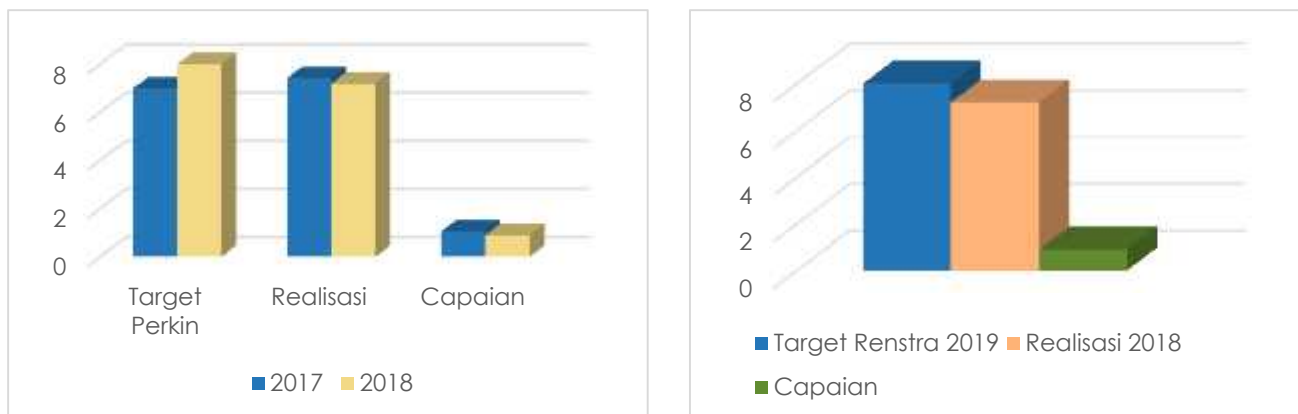
Jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra pada tahun 2019 sebesar 8, maka realisasi IKU tahun 2018 mencapai 90%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja tahun 2018 perlu ditingkatkan.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja IKU agar dapat mencapai target tahun 2019 antara lain:

- a. Mengoptimalkan aplikasi DMS dalam pengelolaan layanan kearsipan.
- b. Menyusun SOP Distribusi Persuratan.
- c. Menyusun Rencana Kebutuhan Barang (RKB).
- d. Percepatan waktu penyelesaian pertanggungjawaban keuangan serta penyediaan media informasi terkait keuangan.
- e. Pemutakhiran data kepegawaian secara *real time* melalui aplikasi SISPEDAP.

Perkembangan target, realisasi dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2018 dan target akhir Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2019 disajikan pada Gambar 3.5.

Gambar 3.5
Target, Realisasi dan Capaian Kinerja
Kepuasan atas Pelayanan Sekretariat Utama dengan target 8 Skala 1-10



2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA KEGIATAN

Dalam Perkin Tahun 2018 Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara ditargetkan 6 (enam) sasaran kegiatan pengawasan dengan 6 (enam) indikator kinerja kegiatan (IKK) dan 2 (dua) sasaran kegiatan dukungan pengawasan dengan 3 (tiga) IKK. Capaian IKK tahun 2018 disajikan pada Tabel 3.11.

Tabel 3.11
Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Kegiatan
Tahun 2018

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Capaian Kinerja
1	Tersedianya informasi hasil pengawasan PSN di Perwakilan	1.1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan PSN BPKP Perwakilan	Laporan	59	59	100%
2	Tersedianya informasi hasil pengawasan di Siskeudes Perwakilan	2.1 Jumlah LHP Siskeudes BPKP Perwakilan	Laporan	15	15	100%
3	Tersedianya informasi hasil pengawasan penerapan SIMDA di Perwakilan	3.1 Jumlah LHP SIMDA BPKP Perwakilan	Laporan	3	3	100%
4	Tersedianya informasi hasil pengawasan prioritas nasional	4.1 Jumlah LHP BPKP Perwakilan	Laporan	79	77	97,47%
5	Tersedianya informasi hasil pembinaan Perwakilan	5.1 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP BPKP Perwakilan	Laporan	25	25	100%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Capaian Kinerja
6	Tersedianya informasi hasil pembinaan kapabilitas Perwakilan APIP	6.1 Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Perwakilan	Laporan	38	38	100%
7	Sasaran Kegiatan Dukungan					
7.1	Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan	7.1.1 Jumlah layanan dukungan manajemen Perwakilan BPKP	Laporan	12	12	100%
7.2	Termanfaatkannya Aset secara optimal	7.2.1 Tersedianya alat pengolah data dan komunikasi BPKP	Unit	23	24	104,35%
		7.2.2 Tersedianya Peralatan Fasilitas Perkantoran BPKP	Unit	15	15	100%

Capaian kinerja masing-masing IKK di atas diuraikan sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan 1: Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan 260 PSN di Perwakilan

Sasaran kegiatan "Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan 260 PSN di Perwakilan" didukung 1 (satu) IKK, yaitu "Jumlah Laporan Hasil Pengawasan PSN BPKP Perwakilan".

Realisasi *output* tahun 2018 sebanyak 59 laporan atau mencapai 100% dari target.

Realisasi *output* sampai dengan tahun 2018 sebanyak 59 laporan tidak dapat dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 karena perbedaan sasaran kegiatan.

PSN yang dilakukan pengawasan (monitoring, reviu, evaluasi, dll) oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 sebanyak 59 penugasan PSN, antara lain penugasan:

No.	Jenis PSN
1	Pembangunan Kawasan Industri Konawe (KIK) di Kabupaten Konawe.
2	Pembangunan <i>Smelter</i> di Kawasan Industri Konawe di Kabupaten Konawe.
3	Pembangunan Bendungan Ladongi.
4	Percepatan infrastruktur untuk Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di Kabupaten Wakatobi yaitu proyek pelebaran landas pacu dan renovasi interior terminal Bandara Matahora Kabupaten Wakatobi, proyek renovasi Jalan Poros Padakuru dan pembangunan Pelabuhan Kaledupa.
5	Proyek Perhutanan Sosial dan Proyek Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA).
6	Proyek Peremajaan Perkebunan Rakyat.

Realisasi indikator kinerja kegiatan didukung dengan dana sebesar Rp1.279.801.193,00 atau 84,12% dari anggaran tahun 2018 sebesar Rp1.521.466.000,00 dan dengan SDM sebanyak 2.366 OH atau 58,75% dari rencana tahun 2018 sebanyak 4.027 OH.

Dari sisi penggunaan dana, IKK “Jumlah Laporan Hasil Pengawasan PSN BPKP Perwakilan” **telah tercapai secara efisien**. Kondisi ini terlihat dari capaian indikator kinerja tahun 2018 sebesar 100% lebih tinggi dibandingkan dengan capaian dana tahun 2018 sebesar 84,12%.

Dari sisi penggunaan sumber daya manusia (OH), IKK “Jumlah Laporan Hasil Pengawasan PSN BPKP Perwakilan” **telah tercapai secara efisien**. Kondisi ini terlihat dari capaian indikator kinerja tahun 2018 sebesar 100% lebih tinggi dibandingkan dengan capaian OH tahun 2018 sebesar 58,75%.

Sasaran Kegiatan 2: Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan Siskeudes di Perwakilan

Sasaran kegiatan “Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan Siskeudes di Perwakilan” didukung 1 (satu) IKK, yaitu “Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Siskeudes BPKP Perwakilan”.

Realisasi *output* tahun 2018 sebanyak 15 (lima belas) laporan atau mencapai 100% dari target.

Realisasi *output* sampai dengan tahun 2018 sebanyak 15 (lima belas) laporan meningkat 100%, sedangkan pada tahun 2017 tidak terdapat target dalam perkin.

Tabel 3.12
Implementasi Siskeudes Tahun 2015 s.d. 2018

No.	Pemda	Jumlah Desa	Jumlah Desa yang Mengimplementasikan Siskeudes			
			2015	2016	2017	2018
1.	Kabupaten Bombana	121	0	0	93	121
2.	Kabupaten Buton	83	0	0	80	83
3.	Kabupaten Buton Selatan	60	0	0	45	60
4.	Kabupaten Buton Tengah	67	0	0	21	67
5.	Kabupaten Buton Utara	78	0	78	78	78
6.	Kabupaten Konawe	297	0	240	294	297
7.	Kabupaten Konawe Kepulauan	89	0	0	11	74
8.	Kabupaten Konawe Selatan	336	0	336	288	288
9.	Kabupaten Konawe Utara	159	0	0	159	159
10.	Kabupaten Kolaka	100	0	100	100	100
11.	Kabupaten Kolaka Timur	117	0	118	117	117
12.	Kabupaten Kolaka Utara	127	0	125	127	127
13.	Kabupaten Muna	124	0	124	124	124
14.	Kabupaten Muna Barat	81	0	0	56	81
15.	Kabupaten Wakatobi	75	0	75	76	75
	Jumlah	1.914	0	1.196	1.669	1.851

Pada tahun 2015 implementasi di Provinsi Sulawesi Tenggara masih sebatas bimbingan teknis kepada pemda.

Realisasi indikator kinerja kegiatan didukung dengan dana sebesar Rp284.509.433,00 atau 84,62% dari anggaran tahun 2018 sebesar Rp336.209.000,00 dan dengan SDM sebanyak 390 OH atau 66,67% dari rencana tahun 2018 sebanyak 585 OH.

Dari sisi penggunaan dana, IKK “Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Siskeudes BPKP Perwakilan” **telah tercapai secara efisien**. Kondisi ini

terlihat dari capaian indikator kinerja tahun 2018 sebesar 100% lebih tinggi dibandingkan dengan capaian dana tahun 2018 sebesar 84,62%.

Dari sisi penggunaan sumber daya manusia (OH), IKK “Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Siskeudes BPKP Perwakilan” **telah tercapai secara efisien**. Kondisi ini terlihat dari capaian indikator kinerja tahun 2018 sebesar 100% lebih tinggi dibandingkan dengan capaian OH tahun 2018 sebesar 68,54%.

Hal-hal yang masih perlu diperhatikan dalam implementasi Aplikasi Siskeudes, yaitu:

- a. Kemampuan para operator desa dalam menggunakan komputer yang masih terbatas.
- b. Pemerintah Kabupaten belum memiliki *Server Database* Siskeudes.
- c. Kecenderungan terjadinya pergantian operator desa dengan adanya Pilkades.
- d. Implementasi Siskeudes sebagian besar masih terbatas pada proses penganggaran, belum sampai tahap penatausahaan dan pelaporan keuangan desa.
- e. Pemda belum membuat *database* kompilasi laporan keuangan desa.

Sasaran Kegiatan 3: Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan Penerapan SIMDA di Perwakilan

Penerapan SIMDA pada tahun 2018 di Provinsi Sulawesi Tenggara difokuskan pada implementasi SIMDA Perencanaan yang mendukung sasaran kegiatan “Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan Penerapan SIMDA di Perwakilan” didukung 1 (satu) satu IKK, yaitu “Jumlah Laporan Hasil Pengawasan SIMDA BPKP Perwakilan”.

Realisasi *output* tahun 2018 sebanyak 3 (tiga) laporan atau mencapai 100% dari target.

Realisasi *output* sampai dengan tahun 2018 sebanyak 3 laporan meningkat 100% dibandingkan dengan realisasi tahun 2017. Pada tahun 2017 belum masuk ke dalam perkin.

Pada tahun 2018 untuk meningkatkan implementasi SIMDA Perencanaan pada Provinsi Sulawesi Tenggara, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi

Tenggara melakukan kegiatan sosialisasi, *coaching clinic* dan bimbingan teknis kepada 16 (enam belas) pemda dan telah mengimplementasikan SIMDA Perencanaan. Untuk 2 (dua) pemda, yaitu Pemkot Baubau dan Pemkab Buton Utara belum mengimplementasikan SIMDA Perencanaan karena belum dilakukan bimtek.

Faktor pendukung meningkatnya kinerja *output* antara lain:

- a. Seluruh pemda di Provinsi Sulawesi Tenggara telah menggunakan SIMDA Keuangan.
- b. Capaian penerapan SIMDA Perencanaan dipantau oleh KPK.

Tabel 3.13
Pemda yang Melakukan Implementasi SIMDA Perencanaan
Tahun 2017 dan 2018

No.	Pemerintah Daerah	Tahun		KET
		2017	2018	
1	Prov. Sulawesi Tenggara	-		
2	Kota Kendari	-		
3	Kota Baubau	-	-	Belum implementasi
4	Kab. Bombana	-		
5	Kab Buton	-		
6	Kab Buton Selatan	-		
7	Kab Buton Tengah	-		
8	Kab Buton Utara	-	-	Belum implementasi
9	Kab Konawe	-		
10	Kab. Konawe Kepulauan	-		
11	Kab. Konawe Selatan	-		
12	Kab. Konawe Utara	-		
13	Kab. Kolaka	-		
14	Kab. Kolaka Timur	-		
15	Kab. Kolaka Utara	-		
16	Kab. Muna	-		
17	Kab. Muna Barat	-		
18	Kab. Wakatobi	-		

Pada tahun 2017 belum ada pemda yang menerapkan SIMDA Perencanaan karena masih tahap sosialisasi SIMDA Perencanaan di Kabupaten Konawe.

Realisasi IKK didukung dengan dana sebesar Rp101.320.003,00 atau 82,56% dari anggaran tahun 2018 sebesar Rp122.726.000,00 dan dengan SDM sebanyak 90 OH atau 100% dari rencana tahun 2018 sebanyak 90 OH.

Dari sisi penggunaan dana, IKK “Jumlah Laporan Hasil Pengawasan SIMDA BPKP Perwakilan” **telah tercapai secara efisien**. Kondisi ini terlihat dari capaian indikator kinerja tahun 2018 sebesar 100% lebih tinggi dibandingkan dengan capaian dana tahun 2018 sebesar 82,56%.

Dari sisi penggunaan sumber daya manusia (OH), IKK “Jumlah Laporan Hasil Pengawasan SIMDA BPKP Perwakilan” **telah tercapai secara efisien**. Kondisi ini terlihat dari capaian IKK tahun 2018 sebesar 100% sama dengan dari rencana OH tahun 2018 sebesar 100%.

Sasaran Kegiatan 4: Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan 10 Prioritas Nasional

Sasaran kegiatan “Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan 10 Prioritas Nasional” didukung 1 (satu) IKK, yaitu “Jumlah Laporan Hasil Pengawasan BPKP Perwakilan”.

Realisasi *output* tahun 2018 sebanyak 77 laporan atau mencapai 97,47% dari target sebanyak 79 laporan sehingga terdapat 2 (dua) laporan yang tidak terealisasikan, yaitu:

- a. 1 (satu) laporan atas penugasan Audit Investigasi Pasar Sentral yang sampai dengan 31 Desember 2018 belum terbit.
- b. 1 (satu) kegiatan audit klaim karena tidak terdapat permintaan audit klaim.

Realisasi *output* sampai dengan tahun 2018 sebanyak 77 laporan tidak dapat dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 karena perbedaan sasaran kegiatan.

Kegiatan pengawasan yang dilaksanakan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara terkait realisasi *output* “Jumlah Laporan Hasil Pengawasan BPKP Perwakilan” antara lain:

- a. Audit Investigasi.
- b. Audit Perhitungan Kerugian Kekayaan Negara.
- c. Audit Dukungan atas Program Tata Kelola Tanpa Kumuh (KOTAKU).
- d. Evaluasi Kinerja RSUD.

Realisasi indikator kinerja kegiatan didukung dengan dana sebesar Rp1.100.833.265,00 atau 89,52% dari anggaran tahun 2018 sebesar Rp1.229.720.000,00 dan dengan SDM sebanyak 2.996 OH atau 67,45% dari rencana tahun 2018 sebanyak 4.442 OH.

Dari sisi penggunaan dana, IKK “Jumlah Laporan Hasil Pengawasan BPKP Perwakilan” **telah tercapai secara efisien**. Kondisi ini terlihat dari capaian indikator kinerja tahun 2018 sebesar 97,47% lebih tinggi dibandingkan dengan capaian dana tahun 2018 sebesar 89,52%.

Dari sisi penggunaan sumber daya manusia (OH), IKK “Jumlah Laporan Hasil Pengawasan BPKP Perwakilan” **telah tercapai secara efisien**. Kondisi ini terlihat dari capaian indikator kinerja tahun 2018 sebesar 97,47% lebih tinggi dibandingkan dengan capaian OH tahun 2018 sebesar 67,45%.

Sasaran Kegiatan 5: Tersedianya Informasi Hasil Pembinaan SPIP Perwakilan

Sasaran kegiatan “Tersedianya Informasi Hasil Pembinaan SPIP Perwakilan” didukung 1 (satu) IKK, yaitu “Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP BPKP Perwakilan”.

Realisasi *output* tahun 2018 sebanyak 25 laporan atau mencapai 100% dari target.

Realisasi *output* sampai dengan tahun 2018 sebanyak 25 laporan meningkat sebanyak 1 (satu) laporan dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sebanyak 24 laporan. Demikian juga dengan capaian *output* tahun 2018 sebesar 100% sama dengan capaian tahun 2017 sebesar 100%.

Capaian IKK didukung dengan dana sebesar Rp508.708.156,00 atau 90,29% dari anggaran tahun 2018 sebesar Rp563.400.000,00 dan dengan SDM sebanyak 1.100 OH atau 90,53% dari rencana tahun 2018 sebanyak 1.215 OH.

Dari sisi penggunaan dana, IKK “Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP BPKP Perwakilan” **telah tercapai secara efisien**. Kondisi ini terlihat dari capaian indikator kinerja tahun 2018 sebesar 100% lebih tinggi dibandingkan dengan capaian dana tahun 2018 sebesar 90,29%.

Dari sisi penggunaan sumber daya manusia (OH), IKK “Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP BPKP Perwakilan” **telah tercapai secara efisien**. Kondisi ini terlihat dari capaian indikator kinerja tahun 2018 sebesar 100% lebih tinggi dibandingkan dengan capaian OH tahun 2018 sebesar 90,53%.

Sasaran Kegiatan 6: Tersedianya Informasi Hasil Pembinaan Kapabilitas APIP Perwakilan

Sasaran kegiatan “Tersedianya Informasi Hasil Pembinaan Kapabilitas APIP Perwakilan” didukung 1 (satu) IKK, yaitu “Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Perwakilan”.

Realisasi *output* tahun 2018 sebanyak 38 laporan atau mencapai 100% dari target.

Realisasi *output* sampai dengan tahun 2018 sebanyak 38 laporan meningkat sebanyak 19 (sembilan belas) laporan atau 50% dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sebanyak 19 (sembilan belas) laporan.

Faktor pendukung meningkatnya kinerja *output* karena semakin intensifnya pembinaan kapabilitas APIP dilakukan baik dari kegiatan bimbingan teknik maupun *Quality Assurance*.

Realisasi indikator kinerja kegiatan didukung dengan dana sebesar Rp739.804.702,00 atau 95,26% dari anggaran tahun 2018 sebesar Rp776.644.000,00 dan dengan SDM sebanyak 1.740 OH atau 99,54% dari rencana tahun 2018 sebanyak 1.748 OH.

Dari sisi penggunaan dana, IKK “Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Perwakilan” **telah tercapai secara efisien**. Kondisi ini terlihat dari capaian indikator kinerja tahun 2018 sebesar 100% lebih tinggi dibandingkan dengan capaian dana tahun 2018 sebesar 95,26%.

Dari sisi penggunaan sumber daya manusia (OH), IKK “Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Perwakilan” **telah tercapai secara efisien**. Kondisi ini terlihat dari capaian indikator kinerja tahun 2018 sebesar 100% lebih lebih tinggi dibandingkan dengan capaian OH tahun 2018 sebesar 99,54% .

Sasaran Kegiatan 7.1: Tersedianya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dalam Mencapai Kepuasan Layanan

Sasaran kegiatan "Tersedianya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dalam Mencapai Kepuasan Layanan" didukung 1 (satu) IKK, yaitu "Jumlah Laporan Dukungan Manajemen BPKP Perwakilan".

Realisasi *output* tahun 2018 sebanyak 12 (dua belas) laporan atau mencapai 100% dari target. Rincian laporan dukungan manajemen sebanyak 12 (dua belas) laporan disajikan pada Tabel 3.14.

Tabel 3.14
Laporan Dukungan Manajemen
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara
Tahun 2018

No	LAPORAN DUKUNGAN MANAJEMEN	JUMLAH OUTPUT
1	Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	8 Laporan
2	Laporan kinerja	4 Laporan
	Jumlah	12 Laporan

Realisasi *output* sampai dengan tahun 2018 sebanyak 12 (dua belas) laporan sama dengan realisasi tahun 2017. Demikian juga dengan capaian *output* tahun 2018 sebesar 100% sama dengan capaian tahun 2017.

Realisasi kinerja kegiatan didukung dengan dana sebesar Rp16.149.306.483,00 atau 98,32% dari anggaran tahun 2018 sebesar Rp16.425.490.000,00 dan dengan SDM sebanyak 2.100 OH atau 100% dari rencana tahun 2018.

Dari sisi penggunaan dana, IKK "Tersedianya Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan" telah tercapai secara efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian IKK tahun 2018 sebesar 100% lebih tinggi dibandingkan dengan capaian dana tahun 2018 sebesar 98,32%.

Dari sisi penggunaan sumber daya manusia (OH), IKK "Tersedianya Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan" telah tercapai secara efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian IKK tahun 2018 sebesar 100% sama dengan dibandingkan dengan capaian OH tahun 2018 sebesar 100%.

Sasaran Kegiatan 7.2: Termanfaatkannya Aset Secara Optimal

Sasaran kegiatan "Termanfaatkannya Aset Secara Optimal" didukung 2 (dua) IKK dengan target, realisasi dan capaian sebagaimana disajikan pada Tabel 3.15.

Tabel 3.15
Target, Realisasi Dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Dukungan 2

No.	IKK	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
8.2.1	Tersedianya Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi BPKP	Unit	23	24	104.35
8.2.2	Tersedianya Peralatan Fasilitas Perkantoran	Unit	15	15	100

Uraian capaian IKK sasaran kegiatan dukungan "Termanfaatkannya Aset Secara Optimal" sebagai berikut:

7.2.1

Tersedianya Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi BPKP

Indikator Kinerja "Tersedianya Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi BPKP" merupakan belanja modal yang terdiri dari:

No	Jenis BMN	Jumlah Unit	Nilai (Rp)
1	Mesin <i>Finger Print</i>	1	6.925.050,00
2	<i>Scanjet</i>	6	28.050.000,00
3	Personal Komputer	10	121.770.000,00
4	<i>Printer</i>	5	9.405.000,00
5	TV LED	1	6.283.200,00
6	Kamera	1	9.900.000,00
	Jumlah	24	182.333.250,00

Realisasi IKK tahun 2018 adalah sebanyak 24 unit atau 104,35% dari target sebesar 23 unit. Hal ini disebabkan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara telah merealisasikan tambahan 1 unit kamera sebesar Rp9.900.000,00. Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara telah melakukan optimalisasi anggaran.

Realisasi IKK didukung dengan dana sebesar Rp182.333.250 atau 99,58% dari anggaran tahun 2018 sebesar Rp183.110.000,00. Dari sisi penggunaan dana, IKK "Tersedianya Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi BPKP" telah tercapai secara efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian IKK tahun 2018

sebesar 104,35% lebih tinggi dibandingkan dengan capaian dana tahun 2018 sebesar 99,58%.

7.2.2.

Tersedianya Peralatan Fasilitas Perkantoran BPKP

Indikator Kinerja “Tersedianya Peralatan Fasilitas Perkantoran BPKP” merupakan belanja modal yang terdiri dari:

No.	Jenis BMN	Jumlah Unit	Nilai (Rp)
1	UPS	12	34.980.000,00
2	AC Split 2 PK	3	25.723.500,00

Realisasi IKK tahun 2018 adalah sebanyak 15 (lima belas) unit atau 100% dari target sebesar 15 (lima belas) unit. Realisasi IKK didukung dengan dana sebesar Rp60.703.500,00 atau 100% dari anggaran tahun 2018 sebesar Rp60.705.000,00.

Dari sisi penggunaan dana, IKK “Tersedianya Peralatan Fasilitas Perkantoran BPKP” telah tercapai secara efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian IKK tahun 2018 sebesar 100% sama dengan dibandingkan dengan capaian dana tahun 2018 sebesar 100%.

B. AKUNTABILITAS KINERJA LAINNYA

1. Kinerja Lain

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara tidak memiliki kegiatan inovasi yang menunjang kinerja tahun 2018.

2. Penghargaan

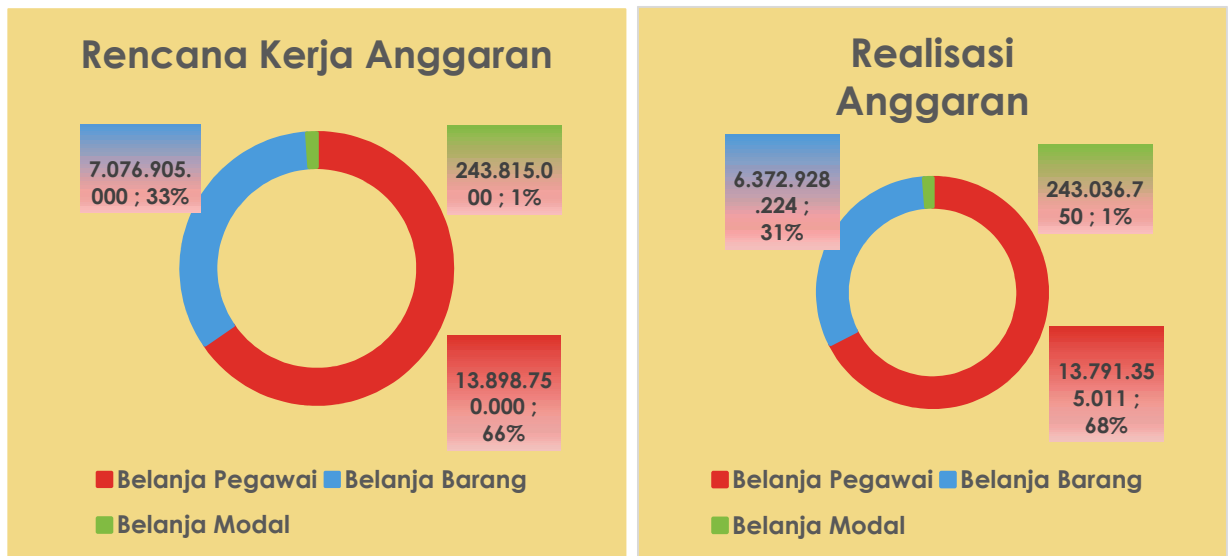
Penghargaan tingkat Nasional yang diterima oleh perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2015 s.d. 2018 adalah:

No.	Nama Penghargaan	Instansi/Lembaga Yang Memberi Penghargaan	Tahun Penghargaan
1	Terbaik Kedua Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 2018 Triwulan III Lingkup Wilayah KPPN Kendari.	KPPN Kendari	2018
2	<i>Eco Office</i> dengan peringkat HIJAU.	Gubernur Sulawesi Tenggara	2016
3.	Menyusun dan Menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2015 dengan Capaian Standar Tertinggi dalam Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah.	Kementerian Keuangan	2015

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Realisasi anggaran Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar Rp20.407.319.985,00 dari anggaran perubahan tahun 2018 sebesar Rp21.219.470.000,00 atau terserap 96,17%. Rincian anggaran per program dan per jenis belanja dapat dilihat pada Gambar 3.6 dan Gambar 3.7.

Gambar 3.6
Anggaran dan Realisasi Keuangan Per Jenis Belanja
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara
Tahun 2018



Gambar 3.7
Anggaran dan Realisasi Per Program
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara
Tahun 2018



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, kebijakan, program, dan kegiatan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) utama, yaitu BPKP Pusat, sebagai salah satu dukungan dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) BPKP serta kepada publik.

Uraian akuntabilitas kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 adalah sebagai berikut.

A. Simpulan Capaian Kinerja

Hasil penilaian pelaksanaan kinerja tahun 2018 menunjukkan bahwa sebagian besar sasaran program Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara yang diukur dengan 17 (tujuh belas) indikator kinerja program (*outcome*) telah tercapai.

Pencapaian kinerja selama tahun 2018 direalisasikan dengan penyerapan anggaran sebesar Rp20.407.319.985,00 atau 96,17% dibandingkan dengan total anggaran setelah adanya revisi sebesar Rp21.219.470.000,00. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi capaian kinerja keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018 sangat baik.

B. Kendala Pencapaian dan Rencana Tindak Perbaikan

Kendala yang dihadapi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara dalam mencapai target kinerja 2018 adalah sebagai berikut:

1. Hasil audit penyesuaian harga yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K tidak tercapai karena tidak ada pelaksanaan kontrak pada K/L/P/K yang mengajukan permintaan penyesuaian harga.
2. Kurangnya komitmen anggota Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KomPAK) untuk mengembangkan sistem pengaduan masyarakat (*Internal Whistle Blowing System*) di lingkungan unit kerjanya.
3. Peningkatan capaian maturitas SPIP pada Pemerintah Kabupaten/Kota yaitu:
 - a. Pemda belum menetapkan target maturitas SPIP dalam RPJMD sehingga penerapan SPIP masih belum menjadi prioritas pemda.

- b. Kurangnya komitmen pemda dalam penerapan SPIP.
 - c. Kurangnya pemahaman SDM SKPD dan APIP dalam penyelenggaraan SPIP dan penyiapan dokumen peningkatan maturitas SPIP.
4. Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota Level 3 belum dapat dicapai antara lain disebabkan oleh:
 - a. Pemda belum menetapkan target Kapabilitas APIP dalam RPJMD sehingga penerapan Kapabilitas APIP masih belum menjadi prioritas pemda.
 - b. Kurangnya komitmen pemda dalam Peningkatan Kapabilitas APIP.
 - c. Kurangnya pemahaman SDM APIP dalam penyelenggaraan Peningkatan Kapabilitas APIP dan penyiapan dokumen peningkatan Kapabilitas APIP.
 - d. Beberapa indikator capaian Kapabilitas APIP level 3 tidak hanya dapat dicapai melalui pemenuhan Infrastruktur Kapabilitas APIP saja, tetapi perlu penerapan dari seluruh Infrastruktur yang telah dibuat dalam kegiatan organisasi.
 - e. Keterbatasan SDM APIP menyebabkan satuan tugas peningkatan kapabilitas APIP yang dibentuk tidak bisa bertugas secara optimal, sehingga penyiapan infrastruktur peningkatan kapabilitas APIP menjadi terhambat.
5. Dukungan Teknis Kepuasan atas Pelayanan Sekretariat Utama Perwakilan BPKP belum dapat dicapai antara lain disebabkan oleh:
 - a. Pengelolaan layanan kearsipan melalui penggunaan aplikasi DMS belum optimal.
 - b. Distribusi dalam persuratan belum tepat waktu.
 - c. Kebutuhan belanja modal belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pegawai.
 - d. Penyelesaian pertanggungjawaban keuangan serta penyediaan media informasi terkait keuangan belum tepat waktu.
 - e. Belum melakukan pemutakhiran data kepegawaian secara real time melalui aplikasi SISPEDAP.

Langkah yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara dalam rangka meningkatkan kinerja di masa mendatang adalah:

1. Memberikan atensi kepada Kepala Daerah untuk meningkatkan tata kelola keuangan daerah, antara lain dalam penggunaan alokasi dana desa (APBD), dana desa (APBN), bansos, hibah, dan pengadaan barang/jasa. Selain itu, mengingatkan pentingnya peran inspektorat sebagai APIP dalam mengawal akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (*Three Line of Defense*).
2. Lebih aktif menjalin komunikasi *stakeholder* khususnya aparat penegak hukum di wilayah Sulawesi Tenggara, serta dengan kedeputian investigasi di BPKP Pusat.
3. Melaksanakan kegiatan pengembangan Komunitas Pembelajar Anti Korupsi dan lebih aktif mendorong anggota Komunitas Pembelajar Anti Korupsi untuk dapat mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat di unit kerjanya.
4. Komunikasi yang lebih efektif dan proaktif dengan Kepala Daerah dan satgas SPIP Pemerintah Daerah se-wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara guna memonitor pemenuhan sub unsur yang diperlukan.
5. Melakukan bimtek/asistensi terhadap pemenuhan dokumen seluruh sub unsur SPIP.
6. Terus meningkatkan kompetensi pegawai secara berkelanjutan terutama dalam rangka mengisi peran BPKP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008, antara lain dengan mengikutsertakan pegawai dalam diklat teknis substansi, meningkatkan kuantitas dan kualitas PPM, menyelenggarakan atau mengikuti forum-forum diskusi, seminar, *workshop*, dan berbagai metode peningkatan kompetensi lainnya.
7. Memperbaiki komposisi pegawai dengan penambahan tenaga Auditor Muda untuk memenuhi kebutuhan tenaga Ketua Tim serta Fungsional Umum untuk memperkuat kegiatan dukungan manajemen di Bidang Ketatausahaan.
8. Meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas, antara lain dengan menyempurnakan secara terus-menerus berbagai pedoman dan SOP yang dibutuhkan, meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas satgas yang telah ada, meningkatkan kualitas pemanfaatan formulir-formulir kendali mutu, mengefektifkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi,

meningkatkan kualitas kertas kerja dan hasil pengawasan, serta melakukan pembenahan administrasi.

9. Meningkatkan komitmen seluruh jajaran Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara untuk bekerja secara profesional, berintegritas dan berdedikasi tinggi, mematuhi aturan perilaku dan etika profesi, serta meningkatkan kualitas budaya kerja dalam rangka mewujudkan visi dan misi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara.
10. Meningkatkan pelaksanaan fungsi kehumasan serta menjalin dan menjaga kerja sama yang baik dengan *stakeholders* secara profesional.
11. Mengoptimalkan aplikasi DMS dalam pengelolaan layanan kearsipan.
12. Menyusun SOP Distribusi Persuratan.
13. Menyusun Rencana Kebutuhan Barang (RKB).
14. Percepatan waktu penyelesaian pertanggungjawaban keuangan serta penyediaan media informasi terkait keuangan.
15. Pemutakhiran data kepegawaian secara *real time* melalui aplikasi SISPEDAP.

PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KEGIATAN TAHUN 2018 DENGAN TAHUN 2017
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI TENGGARA

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Realisasi		Naik / (Turun)	Capaian		Naik / (Turun)
				2017	2018		2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7=6-5	8	9	10=9-8
1	Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan 260 PSN di Perwakilan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan PSN BPKP Perwakilan	Laporan	N/A	59	N/A	N/A	100,00%	N/A
2	Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan Siskeudes di Perwakilan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Siskeudes BPKP Perwakilan	Laporan	N/A	15	N/A	N/A	100,00%	N/A
3	Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan Penerapan SIMDA di Perwakilan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan SIMDA BPKP Perwakilan	Laporan	N/A	3	N/A	N/A	100,00%	N/A
4	Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan 10 Prioritas Nasional	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan BPKP Perwakilan	Laporan	N/A	77	N/A	N/A	97,47%	N/A
5	Tersedianya Informasi Hasil Pembinaan SPIP Perwakilan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP BPKP Perwakilan	Laporan	24	25	1	100%	100,00%	0,00%
6	Tersedianya Informasi Hasil Pembinaan Kapabilitas APIP Perwakilan	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Perwakilan	Laporan	19	38	19	100%	100,00%	0,00%
7.1	Tersedianya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dalam Mencapai Kepuasan Layanan	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP	Laporan	12	12	0	100%	100,00%	0,00%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Realisasi		Naik / (Turun)	Capaian		Naik / (Turun)
				2017	2018		2017	2018	
7.2	Termanfaatkannya Aset Secara Optimal	Tersedianya Alat Pengolahan Data dan komunikasi BPKP	Unit	N/A	24	N/A	N/A	100,00%	N/A
		Tersedianya Peralatan Fasilitas Perkantoran BPKP	Unit	N/A	15	N/A	N/A	100,00%	N/A

**KINERJA SASARAN PROGRAM DAN PENGGUNAAN DANA/SDM (OH) TAHUN 2018
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keuangan (Rp000)			SDM (OH)				
							Anggaran (Rp000)	Realisasi (Rp000)	%	Rencana	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara/Korporasi	<i>Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan</i>	%	60,00	62,60	104,33								
		<i>Persentase BUMD yang Kinerjanya Minimal Berpredikat Baik dari BUMD yang Dibina</i>	%	9,00	9,09	101,01								
		<i>Persentase BLUD yang Kinerjanya Minimal Cukup Baik dari BLUD yang Dievaluasi</i>	%	50,00	50,00	100,00								
2	Meningkatnya Efektifitas Hasil Pengawasan Keinvestigasian	<i>Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang Dimanfaatkan di Persidangan</i>	%	50,00	58,18	116,36								
		<i>Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang Dimanfaatkan oleh APH</i>	%	72,00	100,00	138,89								
		<i>Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang Dimanfaatkan oleh K/L/P/K</i>	%	65,00	100,00	153,85								
		<i>Persentase Hasil Audit Penyesuaian Harga yang Dimanfaatkan oleh K/L/P/K</i>	%	75,00	0,00	0,00								
3	Meningkatnya Penyelesaian Hambatan Pelaksanaan Pembangunan Nasional	<i>Persentase Penyelesaian Hambatan Kelancaran Pembangunan</i>	%	75,00	100,00	133,33								
4	Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintah dan korporasi dalam Pencegahan Korupsi	<i>Persentase K/L/P/K Yang Mengimplementasikan FCP (termasuk FRA)</i>	%	52,00	83,33	160,25								
5	Meningkatnya Kepedulian K/L/P/K dan Masyarakat terhadap Korupsi	<i>Persentase K/L/P/K Anggota Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) Yang Mengimplementasikan Sistem Pengaduan Masyarakat</i>	%	65,00	0,00	0,00								
6	Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP Pemda	<i>Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP Level 3</i>	%	100,00	100,00	100,00								
		<i>Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 3</i>	%	59,00	59,00	100,00								
		<i>Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 2</i>	%	41,00	5,88	14,35								
7	Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah Pemda	<i>Persentase APIP Pemerintah Provinsi dengan Kapabilitas Level</i>	%	100,00	0,00	0,00								
		<i>Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas Level 3</i>	%	35,00	0,00	0,00								

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keuangan (Rp000)			SDM (OH)		
							Anggaran (Rp000)	Realisasi (Rp000)	%	Rencana	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<i>Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas Level 2</i>	%	65,00	118,18	181,82						
Sub Jumlah Pengawasan							4.550.165.000	4.014.976.752	88,23804746	12.107	8.682	71,71058066
8	Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan atas Pelayanan Sekretariat Utama	Kepuasan atas Pelayanan Sekretariat Utama (skala likert 1-10)	skala	8	7,2	90						
Sub Jumlah Dukungan Teknis							16.669.305.000	16.392.343.233	98,33849241	2.220	2.220	100
JUMLAH							21.219.470.000	20.407.319.985	96,17	14.327	10.902	76,09

**JUMLAH DESA IMPLEMENTASI SISKEUDES TAHUN 2015 S.D. 2018
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

No.	Nama Pemda	2015		2016		2017		2018	
		Jumlah Desa	Implementasi Siskeudes	Jumlah Desa	Implementasi Siskeudes	Jumlah Desa	Implementasi Siskeudes	Jumlah Desa	Implementasi Siskeudes
1	Kabupaten Bombana	116	-	121		121	93	121	121
2	Kabupaten Buton	83	-	83		83	80	83	83
3	Kabupaten Buton Selatan	60	-	60		60	45	60	60
4	Kabupaten Buton Tengah	67	-	67		67	21	67	67
5	Kabupaten Buton Utara	78	-	78	78	78	78	78	78
6	Kabupaten Konawe	241	-	240	240	297	294	297	297
7	Kabupaten Konawe Kepulauan	89	-	72		89	11	89	74
8	Kabupaten Konawe Selatan	336	-	336	336	336	288	336	288
9	Kabupaten Konawe Utara	135	-	157		159	159	159	159
10	Kabupaten Kolaka	100	-	100	100	100	100	100	100
11	Kabupaten Kolaka Timur	118	-	118	118	117	117	117	117
12	Kabupaten Kolaka Utara	127	-	125	125	127	127	127	127
13	Kabupaten Muna	124	-	124	124	124	124	124	124
14	Kabupaten Muna Barat	81	-	81		81	56	81	81
15	Kabupaten Wakatobi	75	-	75	75	75	76	75	75
	Jumlah	1.830	-	1.837	1.196	1.914	1.669	1.914	1.851

**PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN *OUTCOME* TAHUN 2018 DENGAN TAHUN 2017 DAN TARGET 2019
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi		Naik / (Turun)	Capaian (%)		Naik / (Turun) (%)	Realisasi 2018	Target 2019	% realisasi 2018 dari target 2019
				2017	2018		2017	2018				
1	2	3	4	5	6	7=6-5	8	9	10=9-8	11	12	13=11/12*100 %
1	Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara/Korporasi	<i>Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan</i>	%	54,81	62,60	7,79	99,65	104,33	4,68	62,60	100,00	62,60
		<i>Persentase BUMD yang Kinerjanya Minimal Berpredikat Baik dari BUMD yang Dibina</i>	%	11,11	9,09	(2,02)	85,47	101,01	15,54	9,09	60,00	15,15
		<i>Presentase BLUD yang Kinerjanya Minimal Cukup Baik dari BLUD yang Dievaluasi</i>	%	0,00	50,00	50,00	0,00	100,00	100,00	50,00	60,00	83,33
2	Meningkatnya Efektifitas Hasil Pengawasan Keinvestigasian	<i>Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang Dimanfaatkan di Persidangan</i>	%	42,65	58,18	15,53	106,63	116,36	9,73	58,18	60,00	96,97
		<i>Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang Dimanfaatkan oleh APH</i>	%	100,00	100,00	-	142,86	138,89	(3,97)	100,00	75,00	133,33
		<i>Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang Dimanfaatkan oleh K/L/P/K</i>	%	100,00	100,00	-	166,67	153,85	(12,82)	100,00	70,00	142,86
		<i>Persentase Hasil Audit Penyesuaian Harga yang Dimanfaatkan oleh K/L/P/K</i>	%	-	0,00	-	-	0,00	-	0,00	80,00	0,00
3	Meningkatnya Penyelesaian Hambatan Pelaksanaan Pembangunan Nasional	<i>Persentase Penyelesaian Hambatan Kelancaran Pembangunan</i>	%	-	100,00	100,00	0,00	133,33	133,33	100,00	0,00	#DIV/0!
4	Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintah dan korporasi dalam Pencegahan Korupsi	<i>Persentase K/L/P/K Yang Mengimplementasikan FCP (termasuk FRA)</i>	%	50	83,33	33,33	100	160,25	60,25	83,33	55	151,51
5	Meningkatnya Kepedulian K/L/P/K dan Masyarakat terhadap Korupsi	<i>Persentase K/L/P/K Anggota Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) Yang Mengimplementasikan Sistem Pengaduan Masyarakat</i>	%	100	0,00	(100,00)	166,67	0,00	(166,67)	0,00	70	0,00
6	Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP Pemda	<i>Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP Level 3</i>	%	100,00	100,00	-	100	100,00	-	100,00	100,00	100,00

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi		Naik / (Turun)	Capaian (%)		Naik / (Turun) (%)	Realisasi 2018	Target 2019	% realisasi 2018 dari target 2019
				2017	2018		2017	2018				
1	2	3	4	5	6	7=6-5	8	9	10=9-8	11	12	13=11/12*100 %
		<i>Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 3</i>	%	29,41	59,00	29,59	101,00	100,00	(1,00)	59,00	52,94	111,45
		<i>Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 2</i>	%	5,88	5,88	-	11,09	14,35	3,26	5,88	47,06	12,50
7	Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah Pemda	<i>Persentase APIP Pemerintah Provinsi dengan Kapabilitas Level 3</i>	%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	100,00	0,00
		<i>Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas Level 3</i>	%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	58,82	0,00
		<i>Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas Level 2</i>	%	35,29	118,18	82,89	86,07	181,82	95,75	118,18	41,18	286,98
8	Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan atas Pelayanan Sekretariat Utama	Kepuasan atas Pelayanan Sekretariat Utama	skala	7,43	7,2	(0,23)	106,14	90	(16,14)	7,20	8,00	90,00

MATURITAS SPIP PEMDA TAHUN 2018
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI TENGGARA

No.	Nama Pemda	Skor	Level	Status Terakhir *)		
				Self Assessment	QA Perwakilan	Reviu Rendal
1	2	3	5	6	7	8
1	Provinsi Sulawesi Tenggara	3,060	3		v	
2	Kota Kendari	3,106	3		v	
3	Kabupaten Kolaka	3,083	3			v
4	Kabupaten Konawe	3,049	3	v		
5	Kabupaten Kolaka Utara	3,278	3		v	
6	Kabupaten Wakatobi	3,128	3		v	
7	Kabupaten Buton	3,081	3		v	
8	Kabupaten Konawe Selatan	3,036	3			v
9	Kabupaten Konawe Utara	1,198	1	v		
10	Kabupaten Konawe Kepulauan	1,402	1	v		
11	Kabupaten Bombana	3,098	3		v	
12	Kabupaten Kolaka Timur	1,427	1	v		
13	Kota Baubau	3,063	3			v
14	Kabupaten Buton Selatan	1,358	1	v		
15	Kabupaten Buton Utara	1,376	1	v		
16	Kabupaten Buton Tengah	2,005	2	v		
17	Kabupaten Muna	3,083	3		v	
18	Kabupaten Muna Barat	1,932	1	v		

**CAPAIAN KINERJA KEGIATAN DAN EFISIENSI PENGGUNAAN DANA/OH (SDM)
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TAHUN 2018**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Dana (Rp000)			SDM (OH)			Penggunaan Dana Efisien/ Tidak Efisien	Penggunaan SDM/OH Efisien/ Tidak Efisien
							Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan 260 PSN di Perwakilan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan PSN BPKP Perwakilan	Laporan	59	59	100,00	1.521.466.000	1.279.801.193	84,12	4.027	2.366	58,75	Efisien	Efisien
2	Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan Siskeudes di Perwakilan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Siskeudes BPKP Perwakilan	Laporan	15	15	100,00	336.209.000	284.509.433	84,62	585	390	66,67	Efisien	Efisien
3	Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan Penerapan SIMDA di Perwakilan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan SIMDA BPKP Perwakilan	Laporan	3	3	100,00	122.726.000	101.320.003	82,56	90	90	100,00	Efisien	Efisien
4	Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan 10 Prioritas Nasional	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan BPKP Perwakilan	Laporan	79	77	97,47	1.229.720.000	1.100.833.265	89,52	4.442	2.996	67,45	Efisien	Efisien
5	Tersedianya Informasi Hasil Pembinaan SPIP Perwakilan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP BPKP Perwakilan	Laporan	25	25	100,00	563.400.000	508.708.156	90,29	1.215	1.100	90,53	Efisien	Efisien
6	Tersedianya Informasi Hasil Pembinaan Kapabilitas APIP Perwakilan	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Perwakilan	Laporan	38	38	100,00	776.644.000	739.804.702	95,26	1.748	1.740	99,54	Efisien	Efisien
JUMLAH SASARAN KEGIATAN PENGAWASAN				219	217	99,09	4.550.165.000	4.014.976.752	88,24	12.107	8.682	71,71		
7.1	Tersedianya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dalam Mencapai Keuksesan Layanan	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP	Laporan	12	12	100,00	16.425.490.000	16.149.306.483	98,32	2.100	2.100	100,00	Efisien	Efisien
7.2	Termanfaatannya Aset Secara Optimal	Tersedianya Alat Pengolahan Data dan komunikasi BPKP	Unit	23	24	104,35	183.110.000	182.333.250	99,58	60	60	100,00	Efisien	Efisien
		Tersedianya Peralatan Fasilitas Perkantoran BPKP	Unit	15	15	100,00	60.705.000	60.703.500	100,00	60	60	100,00	Efisien	Efisien
JUMLAH SASARAN KEGIATAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA							16.669.305.000	16.392.343.233	98,34	2.220	2.220	100,00		
TOTAL							21.219.470.000	20.407.319.985	96,17	12.107	8.682	71,71		

**KAPABILITAS APIP PEMDA TAHUN 2018
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

No.	Nama Pemda	Level	Status Terakhir *)		
			Self Assessment	QA Perwakilan	Reviu Rendal
1	2	3	4	5	6
1	Provinsi Sulawesi Tenggara	2		V	
2	Kota Baubau	2		V	
3	Kota Kendari	2		V	
4	Kabupaten Bombana	2		V	
5	Kabupaten Buton	1	V		
6	Kabupaten Buton Tengah	1		V	
7	Kabupaten Buton Selatan	1		V	
8	Kabupaten Buton Utara	2			V
9	Kabupaten Kolaka	2		V	
10	Kabupaten Kolaka Timur	2		V	
11	Kabupaten Kolaka Utara	2		V	
12	Kabupaten Konawe	2		V	
13	Kabupaten Konawe Kepulauan	2		V	
14	Kabupaten Konawe Selatan	2			V
15	Kabupaten Konawe Utara	2		V	
16	Kabupaten Muna	2			V
17	Kabupaten Muna Barat	1		V	
18	Kabupaten Wakatobi	2		V	

TINGKAT KESEHATAN BUMD TAHUN 2018
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI TENGGARA

No.	Nama PDAM	SKOR	Tingkat Kesehatan
1	PDAM Kabupaten Kolaka Timur	1,770	Sakit
2	PDAM Kabupaten Bombana	2,005	Sakit
3	PDAM Tirta Tampanama Kabupaten Kolaka Utara	2,935	Sehat
4	PDAM Kabupaten Kolaka	1,610	Sakit
5	PDAM Kabupaten Buton	1,885	Sakit
6	PDAM Kabupaten Buton Selatan	2,480	Kurang Sehat
7	PDAM Kabupaten Wakatobi	2,150	Sakit
8	PDAM Kabupaten Muna	2,025	Sakit
9	PDAM Tirta Anoa Kota Kendari	1,970	Sakit
10	PDAM Kabupaten Konawe	1,300	Sakit
11	PDAM Tirta Semerbak Kota Baubau	2,230	Kurang Sehat

REALISASI PENGADAAN BARANG/JASA TAHUN ANGGARAN 2018
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA

No.	Pemaketan dan Metode Pengadaan	Jadwal Pengadaan Menurut RUP	Pagu Anggaran Pengadaan Tahun 2018			Realisasi Unit	Realisasi Pembayaran (Rp.)
			Target Unit	Pagu Awal	Pagu Setelah Revisi RUP		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)		(8)
I Pengadaan Perangkat Pengolahan Data dan Komunikasi							
1	Pengadaan Finger Print	Bulan April 2018	1	10.000.000	6.926.000	1	6.925.050
2	Pengadaan Scanjet	Bulan April 2018	6	52.800.000	28.050.000	6	28.050.000
3	Pengadaan Personal Komputer	Bulan April 2018	10	99.000.000	121.770.000	10	121.770.000
4	Pengadaan Printer	Bulan April 2018	5	5.500.000	9.405.000	5	9.405.000
5	Pengadaan TV Led	Bulan April 2018	1	11.550.000	6.284.000	1	6.283.200
6	Pengadaan Camera Foto	Bulan September 2018	-	-	10.675.000	1	9.900.000
	Jumlah 1		23	178.850.000	183.110.000	24	182.333.250
II Pengadaan Fasilitas Perkantoran							
1	Pengadaan UPS	Bulan April 2018	12	46.200.000	34.980.000	12	34.980.000
2	Pengadaan AC Split 2 PK	Bulan April 2018	3	18.765.000	25.725.000	3	25.723.500
	Sub Jumlah 2		15	64.965.000	60.705.000	15	60.703.500
	Total Jumlah Belanja Modal		38	243.815.000	243.815.000	39	243.036.750

**DAFTAR PENGHARGAAN YANG DITERIMA
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TAHUN 2015 S.D. 2018**

No.	Nama Penghargaan	Instansi/Lembaga Yang Memberi Penghargaan	Tahun Penghargaan
1	Terbaik Kedua Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 2018 Triwulan III Lingkup Wilayah KPPN Kendari.	KPPN Kendari	2018
2	<i>Eco Office</i> dengan peringkat HIJAU.	Gubernur Sulawesi Tenggara	2016
3.	Menyusun dan Menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2015 dengan Capaian Standar Tertinggi dalam Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah.	Kementerian Keuangan	2015



Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara
Jalan Balaikota Nomor 15 Kendari 93117
Telp. (0401) 3125023